

C4932



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) TAHUN 2006 – 2025**

DOKUMENTASI & ARSIP
BAPPENAS
Acc. No. : C 4932 / / 07
Class : / 5064
Checked : 25-07-2007



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN 2006-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 - 2025;
7. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya RPJP Daerah adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi serta saling memperkuat satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

BAB III

SISTEMATIKA RPJP Daerah

Pasal 3

Sistematika penulisan RPJP Daerah terdiri dari :

- Bab I **PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Pengertian RPJP Daerah dan Proses Penyusunan
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Landasan Hukum
 - 1.5 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya
 - 1.6 Sistematika Penulisan

- Bab II **KONDISI DAN PERMASALAHAN DAERAH**
 - 2.1 Kondisi Daerah
 - 2.2 Permasalahan Daerah

- Bab III **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006-2025**
 - 3.1 Visi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2025
 - 3.2 Misi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2025
 - 3.3 Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai

- Bab IV **ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006-2025**
 - 4.1 Umum
 - 4.2 Bidang-bidang

- Bab V **PENUTUP**

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 4

- (1) Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025 dilaksanakan dengan berpedoman RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (2) RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

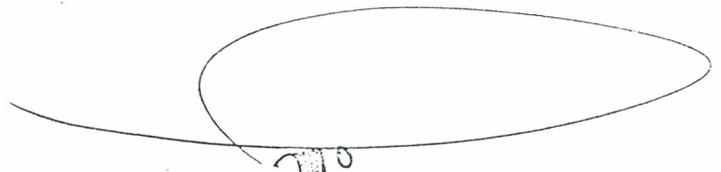
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Mei 2006

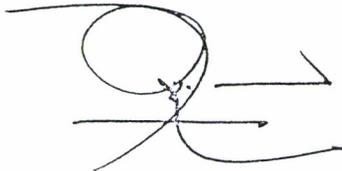
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



H. UJANG ISKANDAR, ST

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 16 Mei 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. KUSNAN ARIADY N.
NIP. 010 072 420

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2006, NOMOR : 10.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2006-2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv

Daftar Isi	Halaman
Bab I Pendahuluan	
1.1. Pendahuluan	I - 1
1.2. Pengertian RPJP Daerah dan Proses Penyusunan	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I - 4
1.4. Landasan Hukum	I - 4
1.5. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 6
1.6. Tata Urut Penulisan	I - 7
Bab II Kondisi dan Permasalahan Daerah	
2.1. Kondisi Daerah	II - 1
2.2. Permasalahan Daerah.....	II - 47
Bab III Visi, Misi dan Arah Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaring Barat Tahun 2006 - 2025	
3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2006 - 2025.....	III - 1
3.2. Arah Pembangunan Daerah 2006 - 2025	III - 6
3.3. Prinsip - Prinsip dan Nilai - Nilai.....	III - 11
Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotawaring Barat Tahun 2006 - 2025	
4.1. Umum	IV - 1
4.2. Bidang - Bidang.....	IV - 7
Bab IV Penutup	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1.	Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Luas Kecamatan	II – 1
2.2.	Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II – 3
2.3.	Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat	II – 6
2.4.	Curah Hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat	II – 8
2.5.	Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II – 10
2.6.	Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	II – 12
2.7.	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II – 22
2.8.	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	II – 34
2.9.	Kondisi Fisik Sarana Kesehatan Dasar	II – 34
2.10.	Jenis Tenaga dan Rasio Terhadap Penduduk.....	II – 34
2.11.	Kinerja SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2004.....	II – 35
2.12.	Jumlah Fasilitas Peribadatan Kabupaten Kotawaringin Barat Dirinci Menurut Kecamatan	II – 38
2.13.	Panjang Menurut Jenis Permukaan Jalan (km)	II – 39
2.14.	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km).....	II – 39
2.15.	Jumlah Prasarana Telekomunikasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II – 43
2.16.	Kapasitas Terpasang, Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II – 44
2.17.	Pelanggan dan Banyaknya Air yang Disalurkan PDAM	II – 44
2.18.	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat Dirinci Menurut Kecamatan	II – 45
2.19.	Daftar Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 – 2004	II – 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1.	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah	I – 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar.	Judul	Halaman
1.	Peta Orientasi Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah	II - 2
2.	Peta Ketinggian	II - 5
3.	Peta Kelerengan	II - 7
4.	Peta Curah Hujan	II - 9
5.	Peta Jenis Tanah	II - 13
6.	Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi dan Sawah.....	II - 15
7.	Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Pangan.....	II - 16
8.	Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Tahunan.....	II - 17
9.	Peta Penggunaan Lahan.....	II - 21
10.	Peta Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat	II - 24
11.	Peta Penyerapan Tenaga Kerja Tiap Kecamatan.....	II - 31
12.	Peta Jaringan Jalan.....	II - 40

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa latar belakang pembentukan daerah dapat menjadi sumber inspirasi awal dalam rangka perumusan Visi pembangunan daerah. Oleh karena itu relevan untuk diketahui sejarah singkat pembentukannya.

Pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau dari aspek sejarahnya; *pertama*: sejak awal pendiriannya telah terbentuk Kabupaten bersamaan dengan berakhirnya perang revolusi dan disusul dengan pengakuan kedaulatan oleh Belanda tgl. 27 Desember 1949 lahirlah Kabupaten Kotawaringin dengan ibu kota Sampit. Kelahiran kabupaten baru ini dikukuhkan dengan Undang Undang No. 22 tahun 1948.

Bahwa Kota Waringin merupakan sebuah Daerah Swapraja, dalam posisi sebagai Daerah Swapraja, maka Kotawaringin Barat terbagi menjadi beberapa Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Asisten Wedana atau Kiai yang dikemudian hari disebut camat, dengan 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Arut Selatan ibukotanya Pangkalan Bun.
2. Kecamatan Kumai ibukotanya Kumai.
3. Kecamatan Sukamara ibukotanya Sukamara.
4. Kecamatan Bulik ibukotanya Nanga Bulik.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat diresmikan oleh Gubernur Tjilik Riwut bertindak a.n. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1959, yang peresmiannya di Balai Sembaga Mas Pangkalan Bun dan C. Mihing sebagai Bupati Kepala Daerah. Bahwa dalam sejarah Kabupaten

Kotawaringin Barat merupakan Bupati yang pertama dengan ditugas utama dalam rangka mempersiapkan menyambut lahirnya daerah ini sebagai Kabupaten. Bupati C. Mihing mengakhiri tugasnya pada tanggal 22 Maret 1960, karena mendapat tugas baru dipindahkan sebagai Bupati Kepala Daerah Kab. Kotawaringin Timur di Sampit. Sebagai penggantinya J.C. Rangkap diangkat pada Tanggal 17 Juli 1957, yang bertepatan pula waktunya dengan peletakkan batu pertama pembangunan Pahandut (Palangkaraya) sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno yang sekaligus pula telah diundangkannya dengan Nomor 21 / 1957 tanggal 23 Mei 1957. Dimana daerah ini, sebelumnya termasuk bagian dari Propinsi Kalimantan Selatan. Karena itu sejarah Propinsi Kalimantan Tengah erat kaitannya dengan sejarah Kalimantan Selatan khususnya, dan sejarah Kalimantan pada umumnya; **kedua:** konsekwensi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Dengan demikian, bahwa latar belakang pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat baik dilatar belakangi sejarah (desakan kedaulatan berdasarkan karakteristik obyektif daerah); tuntutan keadilan dan pemerataan pembangunan merupakan desakan kebutuhan dalam rangka percepatan kemajuan suatu daerah serta pendekatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi, aspirasi obyektif setempat melalui prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Sejalan degan itu pula, diikuti dengan dinamika sosio-budaya dan pembangunan pada masa pemerintahan transisi yang pada akhirnya ditetapkan dengan Undang-undang merupakan wujud nyata aspirasi masyarakat Kobar telah terpenuhi.

Ada sesuatu hal yang sangat menarik dalam aspek sejarah pembentukkan Kabupaten ini, yaitu pada saat berakhirnya perang revolusi. Tidak dapat

dimungkirinya bahwa namanya perang revolusi adalah merupakan perjuangan, bahkan dalam perjuangan memerlukan pengorbanan berupa material, immaterial bahkan menghilangkan nyawa. Ditengah pengorbanan pada masa itu telah bergulir perekat sosial yang menjadi kekuatan besar milik bersama masyarakat daerah Kobar dan sangat berarti peranannya dalam proses mencapai kemerdekaan Republik Indonesia serta terbentuknya Kotawaringin Barat menjadi Kabupaten bersama-sama dengan terbentuknya provinsi Kalimantan tengah. Perekat sosial dimaksud seperti: Bahaum = berunding = musyawarah; Batomu miyadi selaman = bertemu saudara sekampung. Ungkapan kata-kata tersebut sangat bermakna dan mampu membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan.

1.2. Pengertian Renapan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Proses Penyusunan

□ *Pengertian RPJP*

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun.

□ *Proses penyusunan RPJP Daerah*

Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui tahapan sebagai berikut :

Pertama: Penyiapan Rancangan awal RPJP Daerah, dimana kegiatan dibutuhkan mendapat gambaran Visi, Misi, dan arah pembangunan daerah;

Kedua: musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka panjang daerah dengan menghadirkan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap rancangan RPJP Daerah;

Ketiga: penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan RPJP Daerah, menjadi rancangan akhir RPJP Daerah;

Keempat: penetapan RPJP Daerah, tentang RPJP Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi serta saling memperkuat satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kota - Waringin Barat:

A. Undang-undang

1. Amandemen (4) UUD 1945.
2. Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Pilpres Langsung.
3. Undang Undang 17 tahun 2003 Keuangan Negara.
4. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang Undang 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 21 / 1957 tanggal 23 Mei 1957 Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah
9. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Kota Waringin merupakan sebuah Daerah Swapraja.

10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang - undang darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
11. Undang-undang Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Peraturan Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

C. Surat Edaran Menteri:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

D. RPJP Propinsi Kalimantan Tengah 2006-2025

1. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah nomor: 11 Tahun 2005 tentang tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah nomor :12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025.

1.5. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan dokumen perencanaan, bahwa secara hakiki dalam rangka pengendalian evaluasi data informasi mendapat dukungan dari tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu:

a. *Aspek Produk perencanaan*

Adalah sebagai produk perencanaan merupakan dokumen rencana yang memiliki dua dimensi, yaitu pertama: *dimensi waktu* yang meliputi Jangka Panjang (20 Tahunan), Jangka Menengah (5 Tahun) dan Pendek (Tahunan); kedua: *dimensi administratif* merupakan arsip daerah dan arsip nasional yang sangat signifikan dalam rangka pengevaluasian kegiatan masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.

b. *Aspek Operasional*

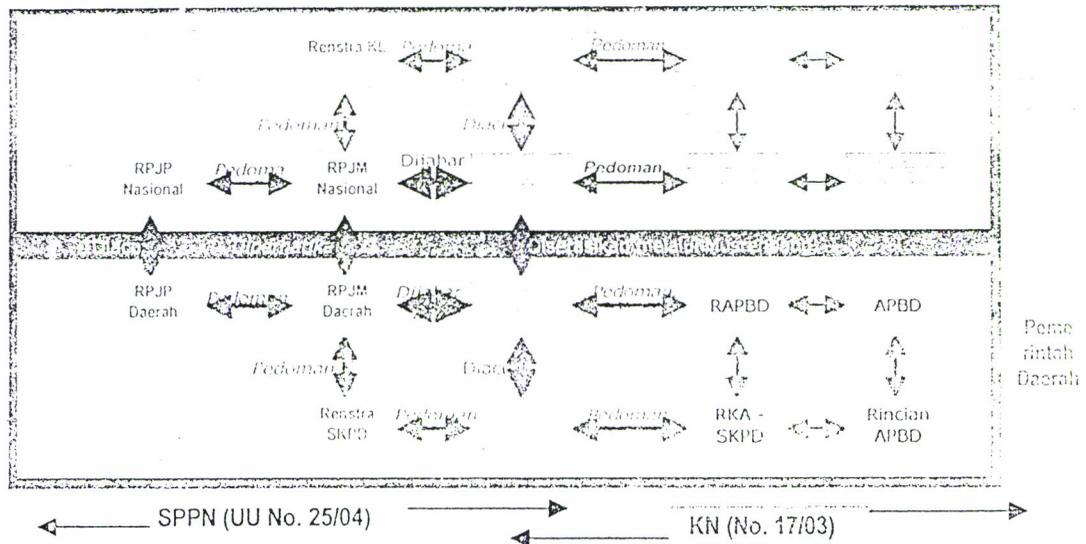
Dari sisi operasional dapat menjadi media komunikatif informasi pembangunan dan pengukuran kinerja, yaitu:

1. Koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan (para stakeholders).
3. Konsistensi antara rencana versus anggaran.
4. Efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya.

c. *Aspek Kelembagaan Perencanaan.*

Akan menunjukkan kualitas kelembagaan itu sendiri dalam arti keterkaitan dalam hal dokumen perencanaan nasional dan daerah ditingkat Nasional RPJP Nasional, RPJP Daerah akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rensra SKPD, RKP Daerah serta Renja SKPD yang kesemuanya sebagai pedoman alokasi sumberdaya, dalam menyiapkan APBD dan melaksanakan rangkaian kegiatan manajemen guna pengendalian evaluasi data informasi. Untuk jelasnya secara skematis dapat dilihat seperti **Gambar 1.1.** berikut ini:

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



Sumber: *Penjelasan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN*

1.6. Tata Urut Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotowaringin Barat Tahun 2006 – 2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi dan Permasalahan Daerah
- Bab III : Visi, Misi
- Bab IV : Arah Pembangunan Daerah
- Bab V : Penutup

KONDISI DAN PERMASALAHAN DAERAH

2.1 Kondisi Daerah

1. Lingkungan Strategis

a. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km² terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng, dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Lihat **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1. Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas (km ²)
1	Kotawaringin Lama	1.218
2	Arut Selatan	2.400
3	Kumai	3.027
4	Pangkalan Banteng	1.098
5	Pangkalan Lada	331
6	Arut Utara	2.685
Kotawaringin Barat		10.759

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2004

Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Lamandau
2. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Seruyan
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau

Gambaran wilayah dan batas geografis Kabupaten Kotawaringin Barat ini secara fisik dapat dilihat pada (*Gambar 1 Peta Orientasi Propinsi Kalimantan Tengah*) dan berada pada posisi bagian barat Kalimantan Tengah.

Berikut Gambar 1 Peta Orientasi Propinsi Kalimantan Tengah

b. Karakteristik Fisik dan Tata Ruang

Topografi, Hidrologi, Klimatologi, Jenis Tanah dan Keseuaian Lahan

Topografi

Ketinggian atau topografi merupakan faktor yang penting di dalam penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan di dalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata - rata 0,6° sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Luas wilayah berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
		0 - 7 m	7 - 25 m	25-100 m	100-500 m	> 500 m	
1	Kotawaringin Lama	-	62.477,0	59.353,0	-	-	121.800
2	Arut Selatan	14.200,0	86.040,0	135.408,0	4.272,0	-	240.000
3	Kumai	71.890,3	69.892,5	151.343,1	9.565,2	-	302.700
4	Pangkalan Banteng	26.076,5	25.351,8	54.897,9	3.469,6	-	109.800
5	Pangkalan Lada	7.863,2	7.644,7	16.554,0	1.046,2	-	33.100
6	Arut Utara	-	-	181.345,0	86.940,0	215	268.500
Jumlah		120.030	251.406	598.906,0	105.293,0	215	1.075.900

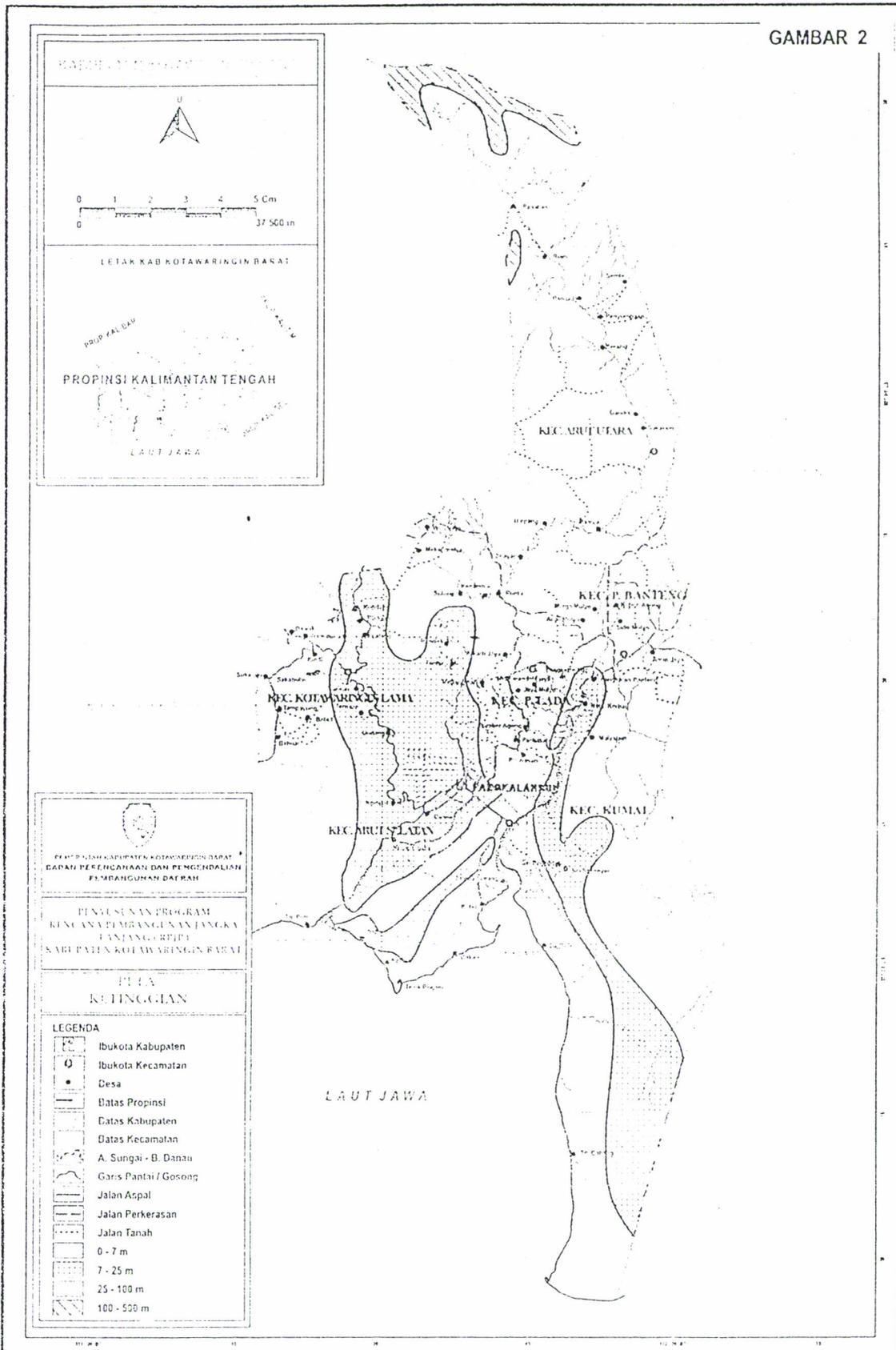
Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka 2004

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau mudah tergenang, berawa - rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Wilayah daratan dengan ketinggian 0 - 7 m dari permukaan laut mempunyai areal yang cukup luas dan lokasinya menyebar, meliputi seluas 120.030 ha atau 11,16 % dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar sampai bergelombang, terkadang tergenang. Wilayah dengan ketinggian 100 - 500 m dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 105.293 ha atau 9,79 % dan lokasinya juga menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut, yang mempunyai sifat berbukit sampai bergunung dengan kelerengan lebih dari 40% dan sangat potensi erosi, merupakan wilayah dengan luasan

yang paling sedikit meliputi luas 125 ha atau 0,0012% dari luas wilayah (*Lihat Peta Gambar 2*).

Berikut gambar 2 Peta ketinggian Wilayah menurut Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

GAMBAR 2



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Kotawaringin Barat

Kelerengan

Sebagian besar Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kelerengan 0 - 15 %, meliputi 764.318 ha atau 71,04 % dari total wilayah. Wilayah dengan kelerengan di atas 40% mempunyai areal yang paling sedikit, khususnya penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana wilayahnya mempunyai ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Kondisi kelerengan Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

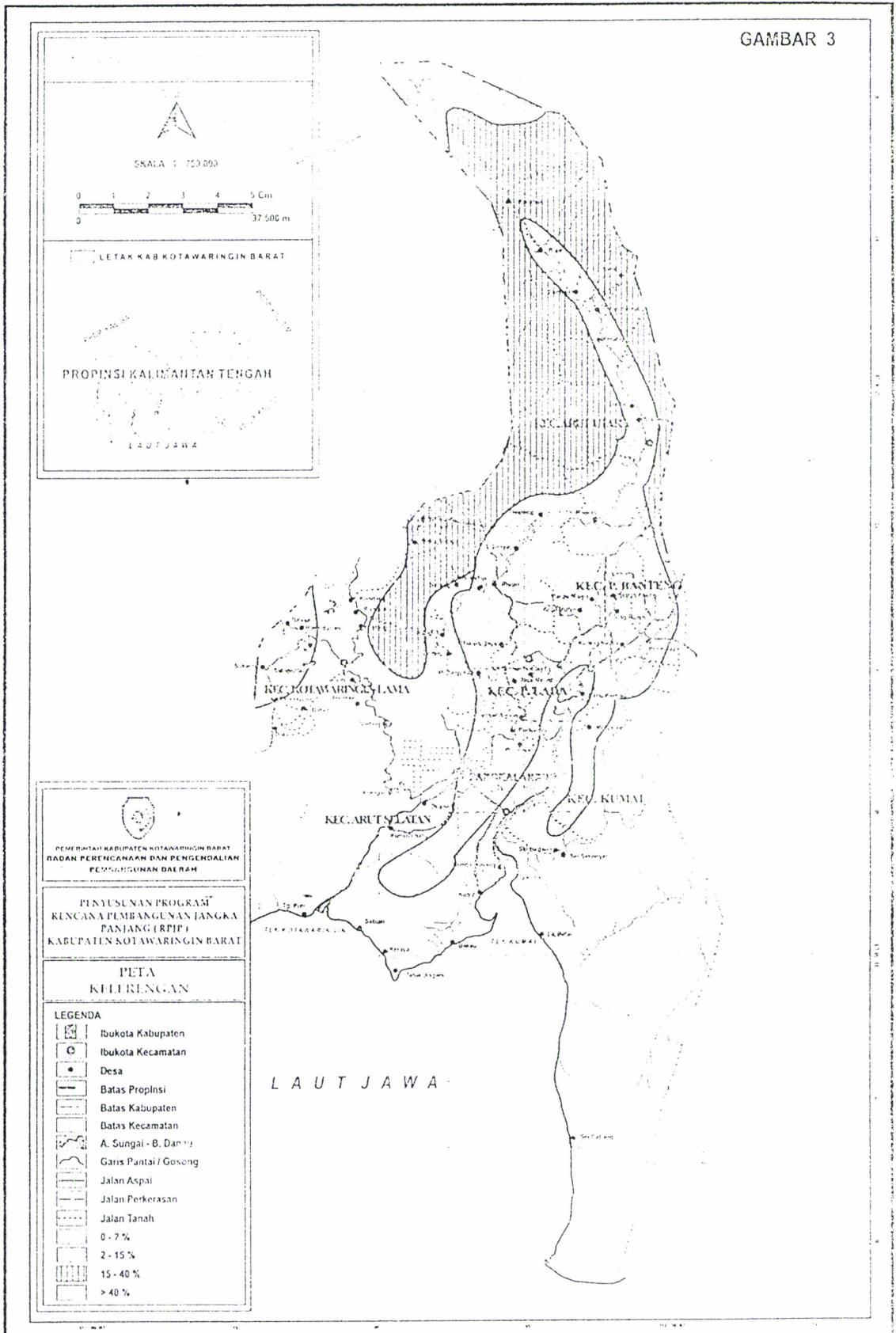
No.	Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
1	Kotawaringin Lama	64.140,0	-	57.773,0	-	121.913
2	Arut Selatan	89.568,0	139.992,0	10.440,0	-	240.000
3	Kumai	137181,9	163.576,8	1.937,4	-	302.700
4	Pangkalan Banteng	49.759,5	59.333,6	702,7	-	109.800
5	Pangkalan Lada	15.004,6	17.891,6	211,9	-	33.100
6	Arut Utara	-	27.870,0	211.927,0	28.703	268.000
	Jumlah	355.654,0	408.654,0	282.992,0	28.703	1.075.900

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka 2004

Secara visual tingkat kelerengan secara keseluruhan dapat dilihat seperti pada (*Peta Gambar 3 Kelerengan*).

Berikut gambar 3 Peta Klasifikasi kelerengan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

GAMBAR 3



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Kotawaringin Barat

Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab, karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar 31,9° C - 33 ° C dan suhu minimum antara 21,9 - 23,8 °C. Rata - rata kecepatan angin dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 4 - 6 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Curah Hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari wilayah Selatan hingga ke pedalaman yang menjadi semakin meningkat. Jumlah curah hujan 3000 mm / tahun dalam 10 tahun terakhir. Kondisi curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4. Curah Hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tahun	Curah Hujan (Mm/Thn)
1	2003	2.993,7
2	2002	3.133,1
3	2001	2.963,4
4	2000	3.399,1
5	1999	3.250,5
6	1998	4.370,3
7	1997	1.563,0
8	1996	2.982,0
9	1995	2.925,0
10	1994	2.617,0
11	1993	2.502,0

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2004

Secara fisual tingkat klimatologi (curah hujan) secara keseluruhan dapat dilihat seperti pada (*peta Gambar 4 Curah Hujan*).

Berikut gambar 4 Peta Curah Hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Diiyari (Km)	Rata-Rata Kedalaman (m)	Rata-Rata Lebar (M)
1	Kumai	175.00	100.00	6.00	300.00
2	Lamandau	300.00	250.00	6.00	200.00
3	Arut	250.00	190.00	4.00	100.00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2004

Kabupaten Kotawaringin Barat secara garis besar dikelompokkan dalam delapan satuan fisiografi, yaitu:

- Daerah dataran aluvial
- Daerah jalur Aliran sungai
- Daerah lembah
- Daerah teras - teras
- Daerah dataran
- Daerah perbukitan

Jenis Tanah

Jenis tanah daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Wilayah kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Podsolik Merah Kuning, Tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan

lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah Kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar dibagian Timur Kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar Daerah Aliran Sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai kebagian tengah Kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.

Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki

tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah Oksolik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan.

Untuk lebih jelasnya, jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6. Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Tanah	Luas (ha)	Prosentase
1.	Oksisol / Lateritik	21.518,00	2,00
2.	Podsolik Merah Kuning	352.895,20	32,80
3.	Kompleks Podsolik	150.626,00	14,00
4.	Aluvial	206.572,80	19,20
5.	Komplek Regosol	154.929,60	14,40
6.	Organosol	189.358,40	17,60

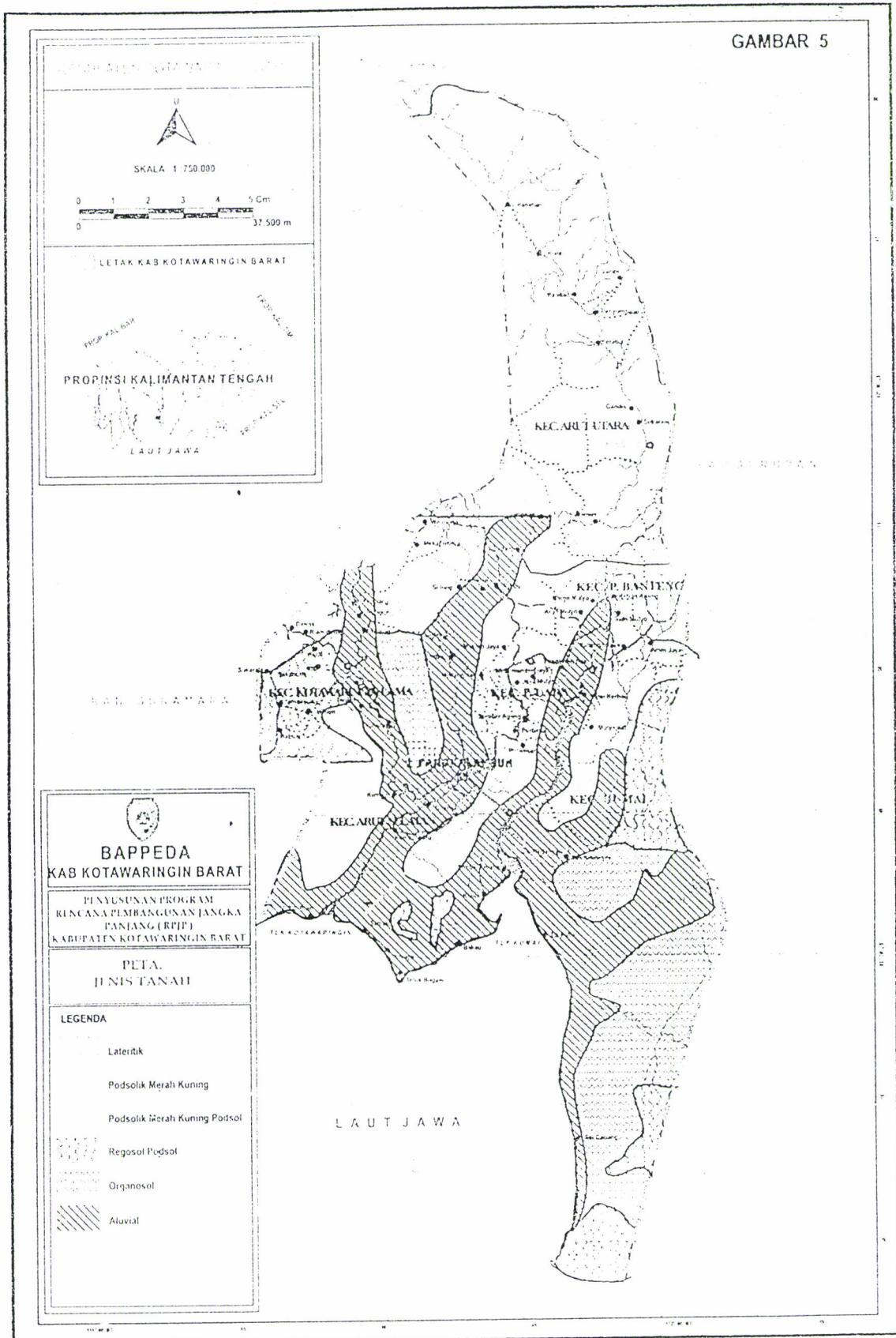
Sumber : BPN Kotawaringin Barat Dalam Angka (2004).

Dari Tabel diatas terlihat bahwa jenis tanah yang terbanyak adalah Podsolik Merah Kuning 352.895,20 ha atau 32,80 %, terdapat menyebar di Kecamatan Arut Utara, dan sedikit di kecamatan Pangkalan Lada, Arut Selatan, Kotawaringin Lama.

Sedangkan jenis tanah lainnya yaitu tanah organosol, kompleks podsolik, aluvial, kompleks regosol, laterik, menyebar di Lima kecamatan yaitu Kecamatan Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Arut Selatan, dan Kotawaringin Lama. Secara fisual dapat dilihat seperti pada (*peta Gambar 5 Jenis Tanah*)

Berikut gambar 5 Peta jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat

GAMBAR 5



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ) Kab. Kotawaringin Barat

Kesesuaian Lahan

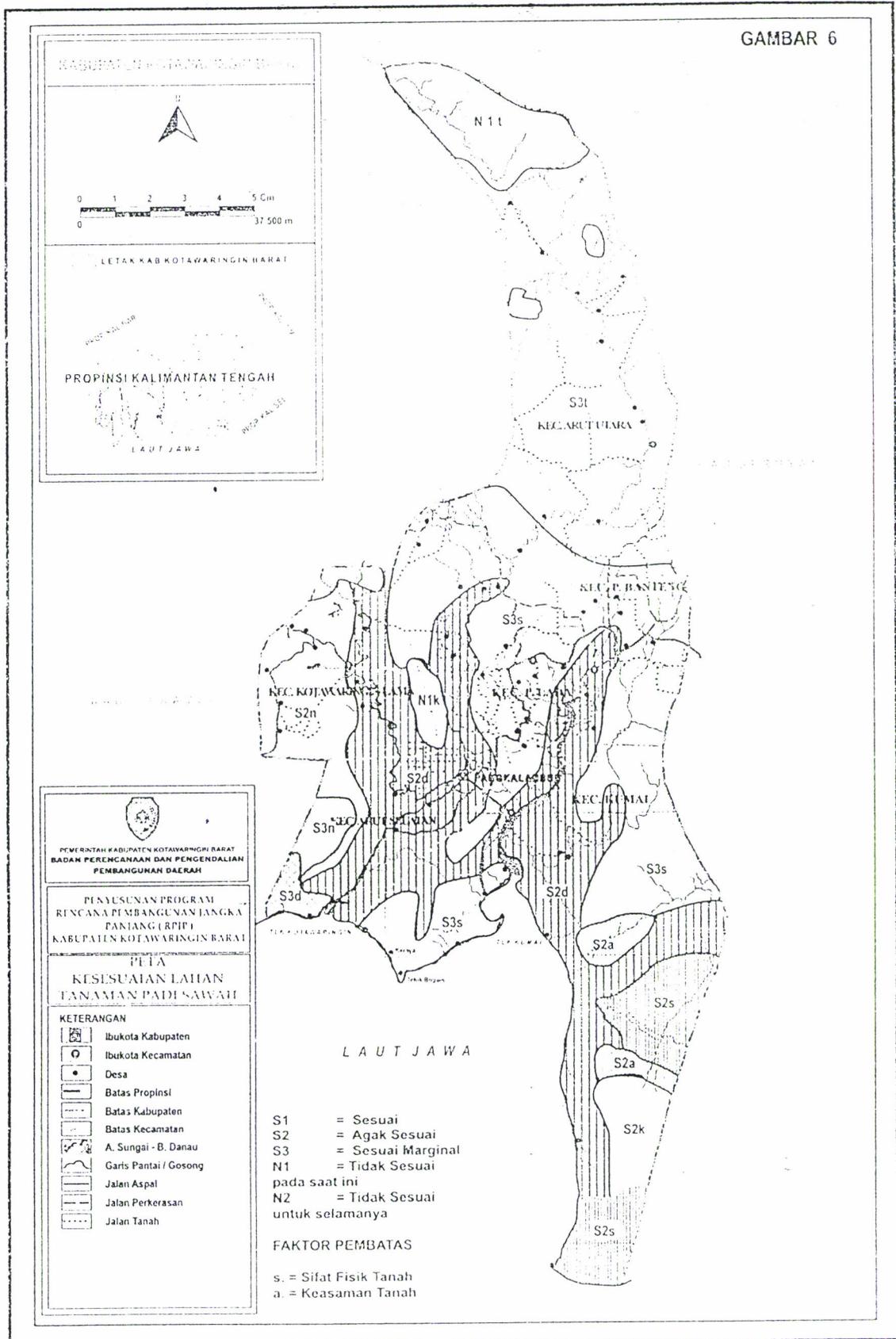
Kesesuaian lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu mulai dari sesuai sampai dengan tidak sesuai untuk saat ini. Pembagian klas kesesuaian lahan ini didasarkan atas sifat fisik dan kimia tanah. Dari sifat fisik dan kimia tanah inilah ditentukan kesesuaian lahan dengan beberapa faktor pembatasnya. Sifat fisik tanah tersebut antara lain topografi drainase, erosi dan lain-lain, sedangkan sifat kimia tanah yang sering merupakan faktor pembatas di Kalimantan Tengah pada umumnya adalah faktor kesuburan tanah yang rendah, kesamaan tanah yang tinggi.

Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah, Kesesuaian Lahan Tanaman Pangan, Kesesuaian Lahan Tahunan

Untuk tanaman padi potensi pengembangannya adalah terletak di sebelah Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat bagian tengah yaitu di Kecamatan Kumai, Arut Selatan, dan Kotawaringin Lama. Kelas kesesuaian lahannya adalah agak sesuai dengan faktor pembatasnya adalah drainase. Untuk menaikkan klas kesesuaiannya menjadi sesuai maka diperlukan masukan-masukan terutama pembuatan saluran drainase. Faktor pembatas lainnya adalah masalah sifat fisik tanah berpasir. Bagian Utara kabupaten Kobar sesuai marginal dan tidak sesuai untuk saat ini (lihat *Peta Gambar . 6; 7; 8*).

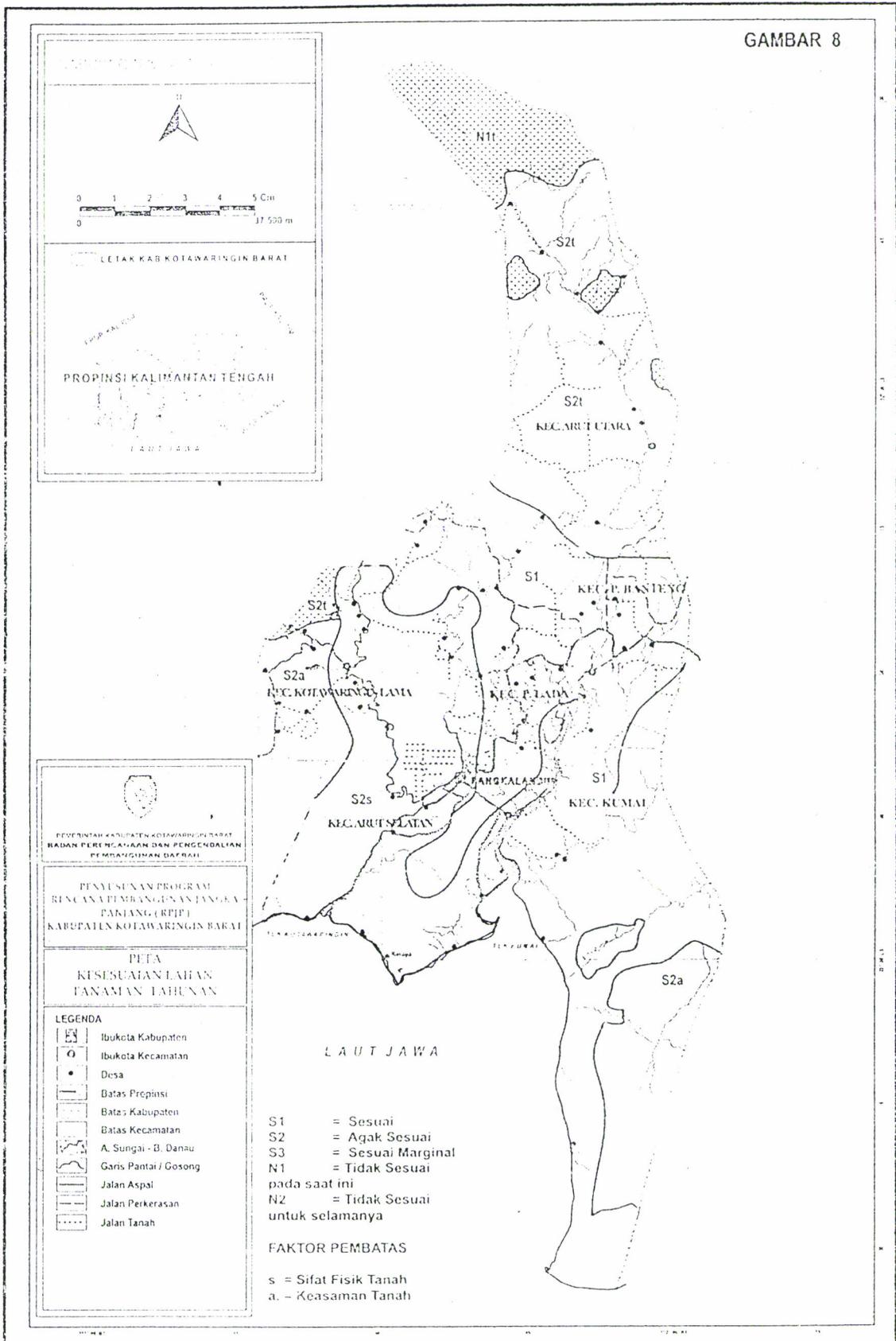
Untuk jelasnya dapat dilihat pada Peta gambar 6 ; 7 dan 8 sebagai berikut :

GAMBAR 6



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Kotawaringin Barat

GAMBAR 8



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Kotawaringin Barat

Karakteristik Sumberdaya Alam

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup besar. Sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagian besar adalah hutan dan hasil ikutannya, perkebunan, perikanan, peternakan. Di samping itu juga mempunyai potensi sumberdaya rawa/danau, sungai, obyek wisata, serta sumberdaya lahan yang sesuai untuk budidaya pertanian dan perkebunan serta peternakan.

Sumber daya mineral di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan pertambangan telah diperoleh data adanya beberapa bahan galian di daerah ini. Dari beberapa bahan galian tersebut baru sebagian kecil yang telah diketahui potensinya, dan sebagian besar masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut bila perlu untuk dikembangkan. Potensi tambang dan bahan galian seperti Emas, Batu bara, Batu belah, Kerikil, Batu Kapur, dan sirtu. Jenis bahan galian ini terletak menyebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada umumnya perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan tersebut baru dalam tahap penyelidikan tahap awal untuk mengetahui cadangan deposit bahan tambang.

Karakteristik Lingkungan

Karakteristik fisik alam wilayah disamping memberikan sumberdaya yang dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan wilayah, juga memberikan kendala pengembangan untuk menjaga agar kehidupan wilayah dapat terus berlanjut. Apabila pemanfaatan sumberdaya alam tidak dilakukan secara bijaksana dan kendala fisik alam tidak diperhatikan, maka kondisi lingkungan akan cenderung rusak dan keberlanjutan kehidupan tidak dapat dijamin.

Mengingat karakteristik dasar dan kekayaan alam yang dimiliki, lingkungan fisik Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat rawan

untuk menurun kualitasnya. Oleh karena itu banyak hal yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan wilayah, agar kondisi lingkungan tetap terjaga, yang pada akhirnya akan menjamin keberlanjutan kehidupan wilayah. Kondisi lingkungan yang rawan terganggu oleh pemanfaatan sumberdaya alam adalah berkaitan dengan intensitas pemanfaatan dan cara pemanfaatan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, maupun sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, serta pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kendala lingkungan dan kesesuaian lahan.

Karakter lingkungan alam non hayati wilayah studi yang perlu diwaspadai adalah potensi bahaya alam. Adapun bahaya alam yang berupa bahaya geologi terdiri atas banjir genangan dan banjir bandang, gerakan tanah (terutama longsoran tanah), dan lempung yang mengembang (*exvansive clay*).

Erosi adalah terkikisnya lapisan tanah oleh air. Keadaan erosi erat kaitannya dengan keadaan lereng dan tutupan vegetasi dipermukaan tanahnya. Tingkat erosi di Kabupaten Kotawaringin Barat belum nyata kelihatan, disebabkan karena sebagian besar wilayah tertutup vegetasi. Pengikisan yang kelihatan terjadi disekitar tebing sungai dan pada lokasi pengelolaan hutan dan kegiatan masyarakat lainnya.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kawasan yang sering terkena banjir, kebakaran hutan, dan erosi. Kawasan yang terkena banjir adalah kawasan tepian sungai baik sungai lamandau, arut maupun kumai dengan permukaan tanah rendah. Kawasan banjir ini melanda desa-desa dan perkebunan rakyat pada saat hujan terutama dibulan Januari dan pebruari. Kebakaran hutan melanda di hampir seluruh kawasan hutan bergambut dan tidak dapat diprediksi ketempat kawasan yang akan terbakar. Penyebab kebakaran ini dapat ditimbulkan oleh pembukaan lahan untuk bercocok tanam yang merambat ke dalam hutan atau memang kondisi hutan itu kekeringan dimusim kemarau terbakar sendiri. Erosi terjadi ditepi

pantai diantara muara sungai dengan sungai arut, dalam hal mana daerah kawasan tersebut cukup potensial untuk pengembangan kawasan wisata pantai.

Karakteristik Penggunaan Lahan

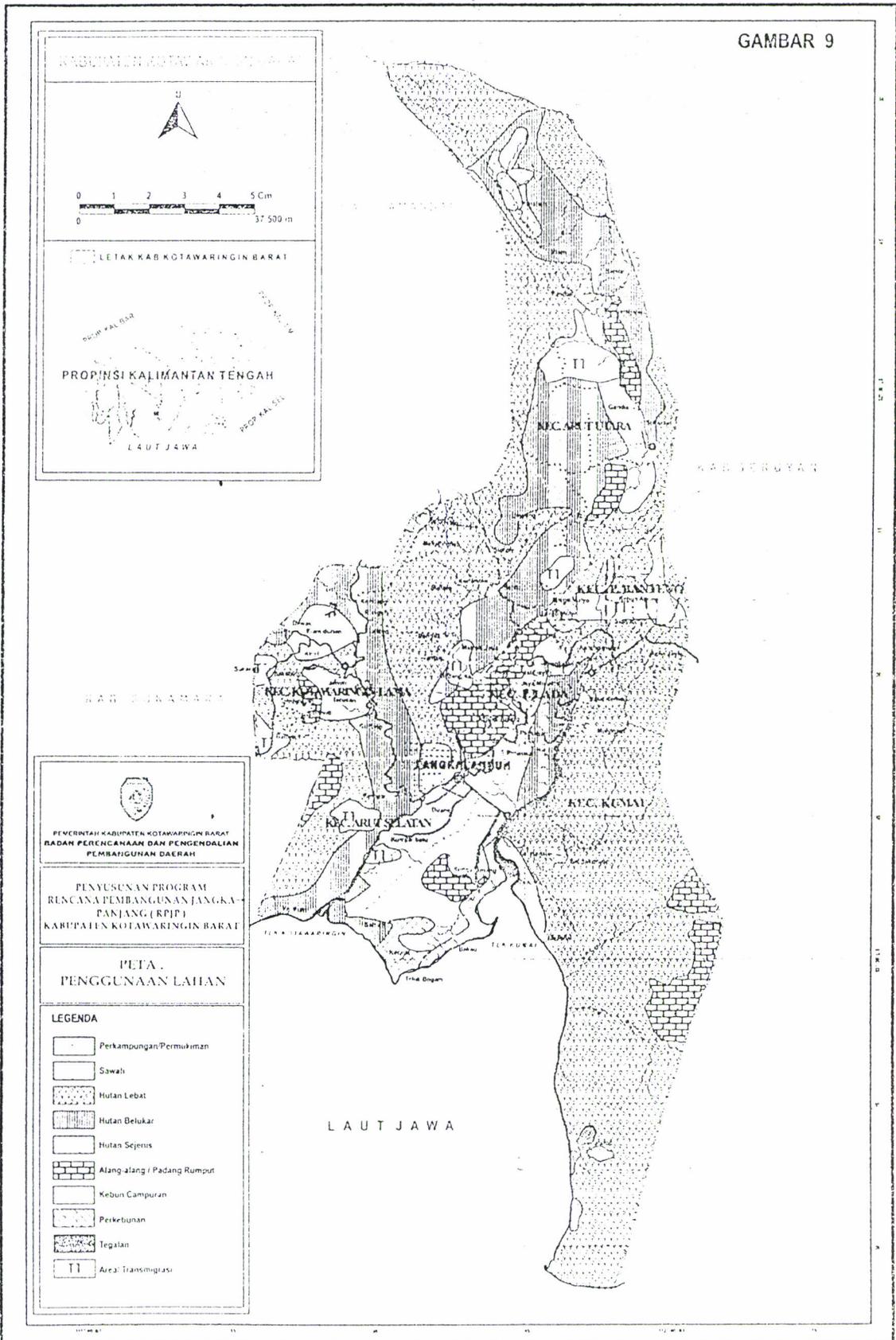
Penggunaan lahan di suatu daerah mencerminkan hubungan antara faktor fisik tanah dengan manusia dan kegiatannya. Suatu wilayah yang jumlah penduduknya masih sedikit akan memperlihatkan pola penggunaan tanah yang belum bervariasi. Pola penggunaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- Penggunaan tanah menetap terdiri dari pemukiman, perkebunan, sawah dan kebun campuran
- Penggunaan tanah tidak menetap, yaitu perladangan, semak, dan alang-alang serta hutan belukar.
- Tanah yang belum diusahakan yaitu hutan, sungai dan danau.

Masih terdapatnya sawah berpindah dengan rotasi pada periode tertentu. Jika tanahnya masih dapat menghasilkan baik maka sawah tersebut akan diusahakan, sebaliknya jika tanah tersebut tidak memuaskan maka akan ditinggalkan sehingga luas sawah yang diusahakan tidak baku (*Lihat Peta Gambar .9 Penggunaan Lahan*).

Berikut Peta gambar 9 tentang Penggunaan Lahan.

GAMBAR 9



Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPIP) Kab. Kotawaringin Barat

Gambaran luas kawasan lindung dan budidaya Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dalam peruntukan status lahan Kotawaringin Barat dalam RTRWP Propinsi Kalimantan Tengah secara rinci seperti Tabel berikut:

Tabel 2.7 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Kabupaten Kotawaringin Barat

F U N G S I	L U A S (Ha)	(%)
Kawasan Lindung	265.990,74	27,72
01. Hutan Lindung	8.676,33	0,90
02. Taman Nasional (TN)	208.506,12	21,73
03. Taman Wisata (TW)	15.900,40	1,66
04. Suaka Margasatwa (SM)	32.907,89	3,43
Kawasan Budidaya	693.462,03	72,28
01. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	83.352,48	8,69
02. Hutan Produksi Tetap (HP)	215.544,24	22,47
03. Kaw. Pengem. Produksi/ Kaw Pemukiman & Penggunaan Lainnya (KPP/ KPPL)	356.639,75	37,17
04. Areal Transmigrasi (T1)	18.330,34	1,91
05. Rencana Areal Transmigrasi (T2)	10.310,81	1,07
06. Kawasan Khusus (KK)	142,29	0,01
07. Danau dan Sungai (DS)	9.142,12	0,95
Jumlah	959.452,77	100

*Ket : Data luas merupakan hasil perhitungan GIS (ArcView Ver 3.2) Peta RTRW Kab Ktw Barat
Sumber: Dinas Kehutanan KOBAR (2005).*

Pada Tabel tersebut di atas bahwa luas peruntukan status lahan seluas 959,452.77 Ha atau 9.594,53 Km². Jika kita bandingkan dengan total luas Kabupaten Kotawaringin Barat 10.759 km² telah terjadi perbedaan seluas lebih kurang 1,164.47 Km². Perbedaan ini terjadi dikarenakan belum diselesaikan penanganan tata batas dengan kabupaten pemekaran.

c. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)

Berdasarkan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat agar terwujudnya pola pelayanan terpadu dan hirarki pengembangan wilayah sehingga dapat menarik potensi ekonomi yang dimilikinya (tidak lari keluar) dan terjadi pemerataan pembangunan wilayah dengan terbentuknya pusat pelayanan dan pusat pelayanan

yang lebih kecil. Untuk maksud tersebut dibentuklah Satuan Pusat Wilayah Pelayanan Pembangunan (SWP, menjadi tiga SWP yaitu:

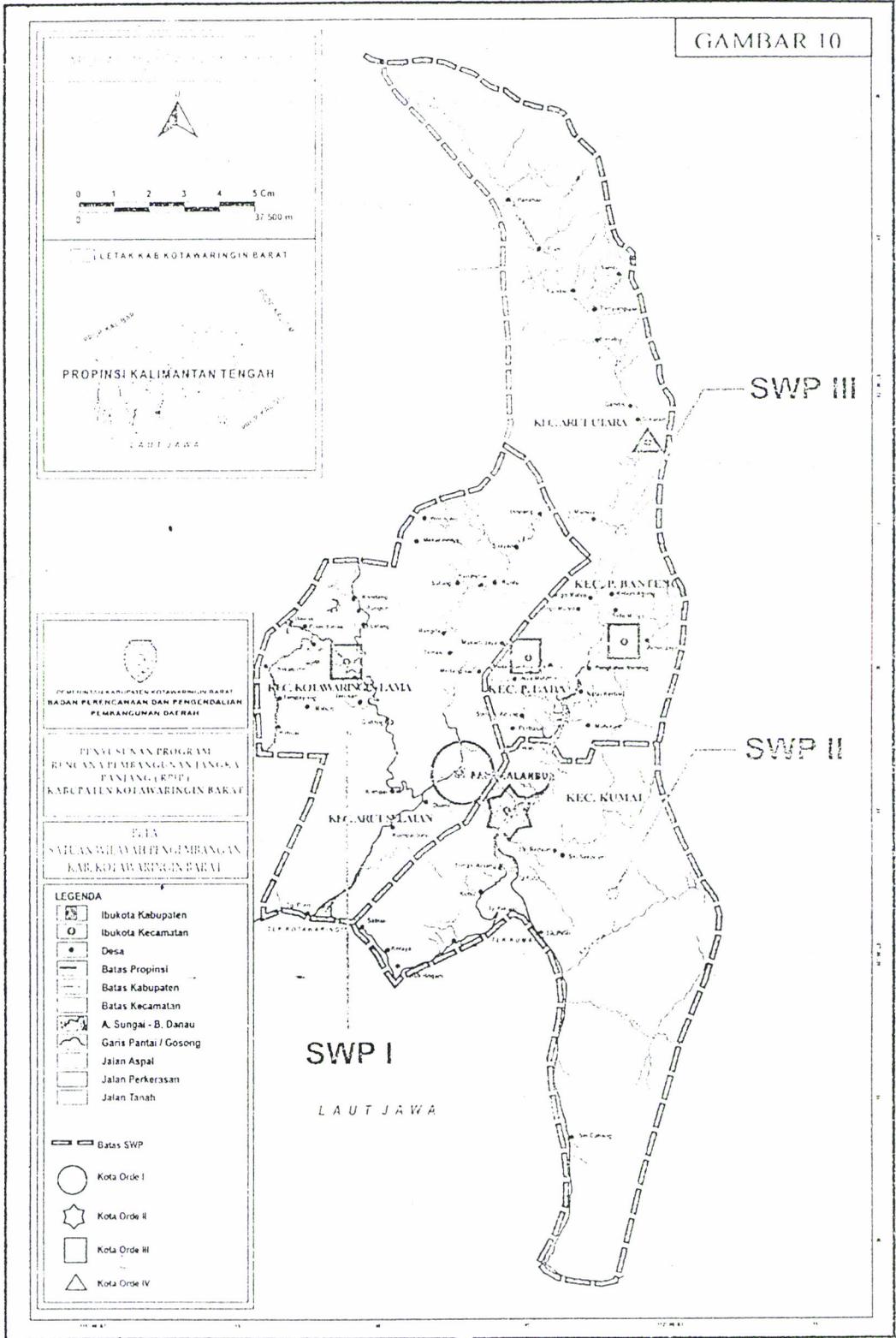
SWP – I : sebagai pusat pengembangan di Kota Pangkalan Bun. Termasuk dalam wilayah ini; Kecamatan Arut Utara; Kecamatan Kotawaringin Lama. SWP-I ini, sebagai serambi propinsi Kalimantan Tengah Bagian Barat (Pemerintahan skala kabupaten, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta sejarah).

SWP – II : dengan pusat pengembangan di Kota Kumai. Termasuk dalam wilayah ini tunggal Kecamatan Kumai. Fungsi wilayah adalah sebagai outlet masuk wilayah kabupaten/propinsi melalui laut.

SWP – III : dengan pusat pengembangan di Kota Pandu Sanjaya. Termasuk dalam wilayah ini, Kecamatan Pangkalan Lada; Kecamatan Pangkalan Banteng; Kecamatan Arut Utara. Fungsi wilayah sebagai Agropolitan Area (dapat dilihat pada Lampiran Peta Gambar 12).

Berikut Peta gambar 10 Pengembangan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

GAMBAR 10



Rencana Pembangunan Lingga Panjang (RPLP) Kab. Kotawaringin Barat

2. Ekonomi

a. PDRB

Perkembangan absolut PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2000 cenderung berfluktuasi, tetapi tidak begitu tajam dan masih dalam kategori menunjukkan trend yang cenderung meningkat, yaitu: tahun 2000 (1,320,348.78); Tahun 2001 (1,365,701.65); Tahun 2002 (1,421,626.19); Tahun 2003 (1,515,481.19); Tahun 2004 (1,600,636.01).

b. Struktur Perekonomian Daerah

Hasil analisis dengan metode shift share, menyatakan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat sangat perlu melakukan tindakan restrukturisasi perekonomian daerah dengan cara meningkatkan sektor industri, perdagangan dan pertanian bahan makanan, peternakan dan perkebunan yang mendukung tumbuhnya industri pertanian yang berkelanjutan.

Kemudian hasil penelitian Pusat Pengembangan Akuntansi FE-Universitas Pajajaran bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan analisis Shift Share juga dengan menggunakan data PDRB tahun 1996 dan 1997 berkesimpulan bahwa: Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki jumlah mixed effect dan share effect yang positif adalah sektor perkebunan dan perikanan (2001; 144).

Dengan demikian, melalui telaahan perbandingan dan hasil penelitian memberikan rekomendasi relatif sama, bahwa sektor pertanian, perkebunan yang dominan mewarnai corak kehidupan perekonomian daerah.

c. PDRB perkapita

Perkembangan pendapatan perkapita Tahun 2000 sebesar Rp 5.327 juta/Tahun; Tahun 2001 sebesar Rp. 5.500 juta/Tahun; Tahun 2002 sebesar Rp. 5.593 juta/Tahun; Tahun 2003 sebesar Rp. 8.040 Juta ; Tahun 2004 sebesar Rp 8.069 Juta/Tahun. Artinya, jika pendapatan perkapita pada tahun 2004 dibagi dua belas bulan sebesar Rp. 0.67

Juta atau sebesar Rp. 670.000,- rata-rata pendapatan penduduk Kobar tiap bulan pada tahun 2004.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Dilihat dari sisi pertumbuhan dalam persentase, bahwa masing-masing lapangan usaha menunjukkan; PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN Tahun 2001 (8.5%), Tahun 2002 (7.1%); Tahun 2003 (10.0%); Tahun 2004 (7.6%); dan subsektor yang mengalami pertumbuhan yang searah adalah subsektor perkebunan, Peternakan Dan Hasil-Hasilnya, Peternakan Dan Hasil-Hasilnya, Perikanan sedangkan subsektor bahan tanaman makanan dan kehutanan mengalami penurunan; selanjutnya sektor PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Tahun 2001 (6.7%); Tahun 2002 (7.7%); Tahun 2003 (9.9%); Tahun 2004 (12,3 %) dan yang paling dominan jenis penggalan sedangkan pertambangan tanpa migas berfluktuatif bahkan pada tahun 2001 dan tahun 2002 mengalami pertumbuhan negatif; khusus sektor industri pengolahan (industri tanpa migas) pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan negatif (-0.5 %), sedangkan tahun 2003 (3.4 %), Tahun 2004 (3,7 %) sedangkan industri migas, penggilingan minyak bumi dan gas alam cair tidak ada tercatat (tidak beraktivitas); LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM mengalami pertumbuhan yang sangat berfluktuasi bahwa tahun 2001 dan 2002 terjadi kenaikan sedangkan tahun 2003 mengalami penurunan dan tahun 2004 mengalami kenaikan yang cukup tajam. Sektor BANGUNAN, PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL juga mengalami kenaikan yang relatif meningkat tiap tahun untuk perdagangan, restoran dan hotel sedangkan bangunan terjadi penurunan tahun 2003; PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI mengalami kenaikan positif sampai dengan tahun 2002, tahun 2003 menurun dan naik tahun 2004; KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN relatif konstant untuk tahun 2003 (2 %); tahun 2004 (2%); sedangkan lapangan usaha jasa-jasa juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Namun pertumbuhan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 4 (empat) tahun

menunjukkan trend yang cenderung meningkat, yaitu Tahun 2001 (3,4 %); Tahun 2002 (4,1 %); Tahun 2003 (6,6 %); Tahun 2004 (5,6 %)

e. Tingkat Inflasi

Gambaran terakhir perkembangan inflasi pada bulan Agustus 2005 menggunakan 54 komoditas yang mempengaruhi terjadinya inflasi di Kota Palangka Raya, diantaranya 33 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya 21 komoditas turun, sehingga menyebabkan terjadinya inflasi pada bulan Agustus sebesar 0,06 %. Tahun kalender 2005 (Januari 2005 – Agustus 2005) apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tingkat inflasi cukup berfluktuasi, yaitu bulan Juli 2005 sebesar 0,72 %, Juni 2005 bernilai – 0,38%, Mei 2005 sebesar – 0,61 %, April 2005 sebesar 0,08 %, Maret 2005 sebesar 1,00 %, Pebruari 2005 sebesar 0.05 % dan Januari 2005 sebesar 0,46 %. Inflasi Palangka Raya tahun kalender 2005 (Januari s/d Agustus 2005) sebesar 1,37 %. Sementara inflasi Indonesia tahun kalender 2005 sebesar 5,66 %.

Secara rinci inflasi Palangka Raya Agustus 2004 – Agustus 2005 dibandingkan dengan laju inflasi Indonesia dengan pengamatan yang sama seperti gambar grafik berikut ini

f. Keuangan daerah

Gambaran secara absolut APBD Kab. Kobar periode 2003-2005 menunjukkan peningkatan dari sisi pendapatan tiap-tiap tahun, tahun 2003 (157,867,754,527); Tahun 2004 (175,997,785,377); Tahun 2005 (215,747,480,340.70). Sedangkan dari sisi belanja juga menunjukkan juga meningkat dan jumlahnya tiap-tiap tahun cenderung lebih besar dari jumlah pendapatan, 2003 (183,287,176,145); Tahun 2004 (212,070,085,881); Tahun 2005 (231,741,056,740.70). Sehingga bedampak anggaran belanja Kabupaten Kobar selalu defisit terus tiap-tiap tahun.

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat kuat didanai dari perimbangan dana pusat selama tiga tahun, dimana

pada tahun 2003 (84,4%); tahun 2004 (88,5%); tahun 2005 (88,6 %). Sedangkan kontribusi pendapatan asli tahun 2003 (9.6%); tahun 2004 (8.7%); tahun 2005 (9.3%). Artinya, kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan PAD sangat terbatas.

3. Sosial Budaya

a. Kependudukan

1. Pada tahun 1998, jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 150.400 jiwa, dan pada tahun 2003 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat menjadi 188.494 jiwa. Berdasarkan perubahan besaran jumlah penduduk tersebut, maka dalam rentang satu dekade penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat telah meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata - rata pertahunnya sebesar 4,03 %. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, dimana perkembangan penduduk mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Perkembangan penduduk Kabupaten Kotawaringin Kecamatan Arut Selatan merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 79.332 jiwa , dengan tingkat pertumbuhan rata - rata tingkat pertumbuhan hanya 3,49 % pertahun. Hal ini dapat dipahami karena lokasi Kecamatan Arut Selatan yang strategis, dan merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat dimana Pangkalan Bun sebagai Ibukotanya. Kecamatan Kumai mempunyai jumlah penduduk terbesar kedua yaitu 39.487 jiwa dengan tingkat pertumbuhan terbesar yaitu 3,5 % pertahun. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Arut Utara yaitu 6.047 jiwa yang mempunyai perkembangan penduduk 9.77%. Angka pertumbuhan penduduk di kecamatan Arut Utara adalah angka pertumbuhan terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2003 adalah 17,52 jiwa / km². Angka tersebut menunjukkan kepadatan penduduk Kotawaringin Barat masih sangat rendah. Hal ini mengingat luasnya wilayah kabupaten dan belum intensifnya

kegiatan sosial ekonomi pada wilayah ini. Jumlah penduduk sebesar 188.494 jiwa tersebar di enam kecamatan. Sebagian besar penduduk, pada tahun 2003 bermukim di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai yaitu 167.603 jiwa atau 88,92 %, dan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Arut Utara. Bila dilihat dari kepadatan penduduk, yang menunjukkan tingkat konsentrasi penduduk, Kecamatan Arut Selatan adalah kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu mencapai 33,06 jiwa / km². Dapat dilihat pada Tabel bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat terkonsentrasi di bagian bagian Hilir (Selatan). Ini membuktikan bahwa konsentrasi kegiatan perekonomian terkonsentrasi di bagian wilayah tersebut.

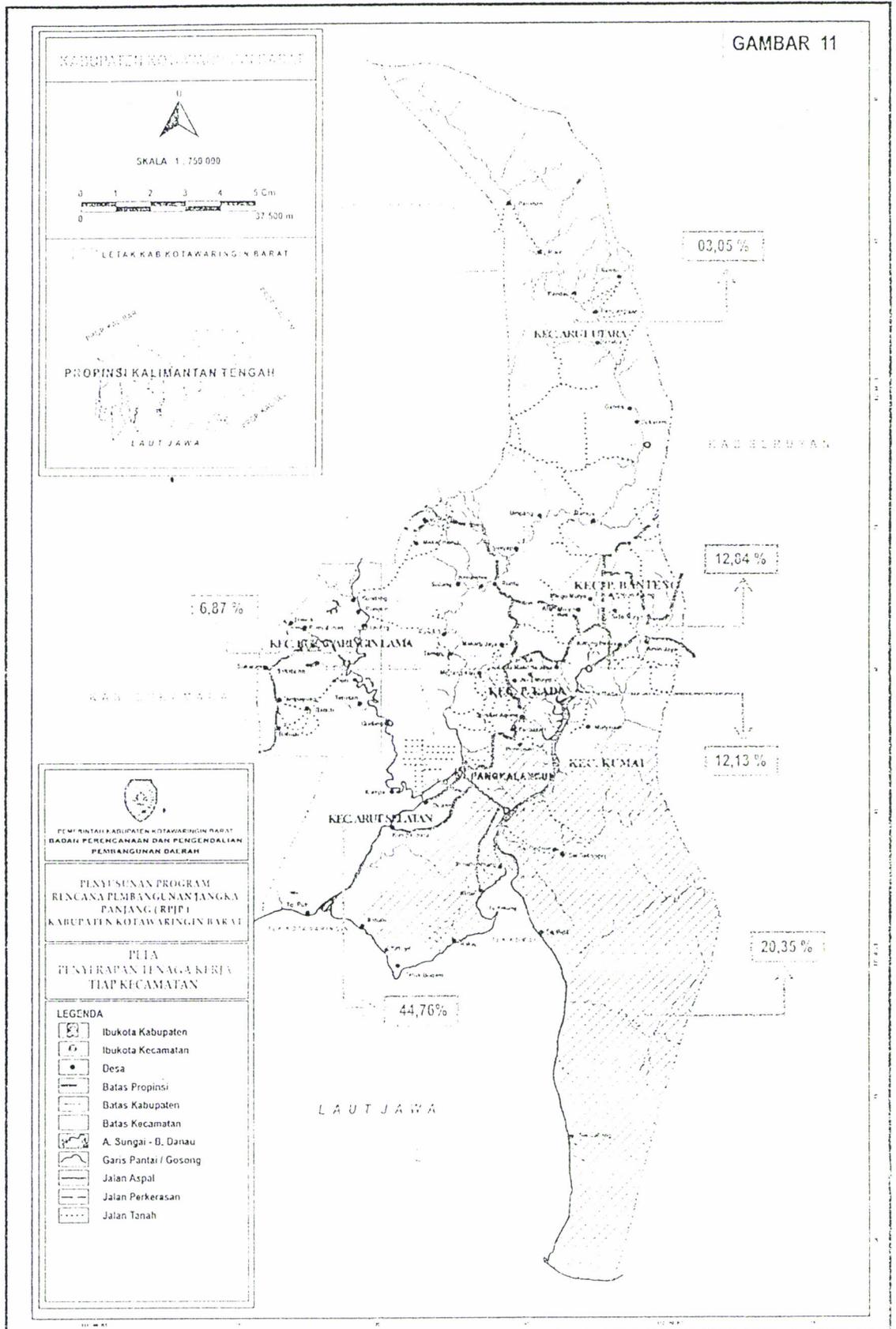
3. Struktur penduduk berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2003, sebesar 188.494 jiwa terdiri dari 99.928 jiwa (53%) adalah laki - laki dan sebesar 88.566 jiwa (47 %) perempuan. Dengan demikian perbandingan seks ratio (laki - laki terhadap perempuan) adalah sebesar 112,83. Dari 188.494 jiwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat 47,8 % merupakan penduduk usia non produktif dan jumlah penduduk untuk usia produktif mencapai 52,2 % atau 98.352 jiwa.
4. Gambaran Mobilitas Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun pada tingkat pertumbuhan yang bervariasi pada setiap tahunnya. Jika pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat disebabkan oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi, gambaran ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kabupaten ini cenderung didominasi oleh pertumbuhan karena migrasi masuk, karena adanya daya tarik sektor pertambangan, perkebunan, industri dan jasa ikutannya serta perusahaan yang mempunyai hak pengusahaan hutan. Tentunya dengan menurunnya daya tarik sektor kehutanan, daya tarik tadi adalah pada sektor yang lain.

b. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan indikator yang akan mampu membaca tingkat produktifitas wilayah. Kecamatan dengan tenaga kerja terbanyak maka dia merupakan kecamatan unggulan. Sampai dengan Tahun 2003 penyebaran penyerapan tenaga kerja dalam persentase menurut masing-masing kecamatan; Kecamatan Kumai 6,87 %; Kecamatan Arut Selatan; 44,76 %; Kecamatan Kumai 20,35 %; Kecamatan Pangkalan Banteng 12,84 %; Kecamatan Pangkalan Lada 12,13 %; Kecamatan Arut Utara 3,05 %. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor: pertanian, 45 %; pertambangan 0,44 %; listrik gas dan ir minum 0,15%; konstruksi 0,38 %; perdagangan 17,39 %; industri 5,21 %; Transportasi 2,27 %; Bank dan Lembaga Keuangan 0,20 %; Pemerintah 13,51 %; Jasa-jasa 15,42 %. Gambaran penyebaran penyerapan tenaga kerja tiap kecamatan dimaksud dapat dilihat pada lampiran peta gambar 11.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Peta gambar 11 Penyerapan tenaga kerja tiap kecamatan sebagai berikut :

GAMBAR 11



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Kotawaringin Barat

c. Kesehatan

Kondisi Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Tahun 2005 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyakit

1. Dominasi penyakit (kasus penyakit terbanyak) : penyakit infeksi menular potensi klb:lspa: 28,50 %; Malaria: 14,15 %; Diare : 5,41 %
2. Penyakit non menular mulai masuk peringkat penyakit terbesar gaya hidup:Tekanan darah tinggi: peringkat 9 ; Kecelakaan: peringkat 11

Penyakit DBD

1. Wilayah terjangkit DBD meluas hingga ke 7 puskesmas (70%).
2. 2 tahun terakhir (2003 & 2004), peningkatan jumlah kasus DBD **sangat tajam** dibanding periode sebelum tahun 2002.

Penyakit DEMAM CHIKUNGUNYA

1. Penyakit ini PERTAMA kali meletus TAHUN 2003 di Desa AMIN JAYA SP-1 Natai Kerbau (Sept 2003).
2. Pada tahun yang sama ditemukan di Ds Pangkalan Tiga (November 2003).!!!
3. Pada tahun 2004, penyakit ini ditemukan kembali di Kotawaringin Hilir dan Kotawaringin Hulu dengan total kasus 34 penderita.
4. Pada th. 2005 muncul kembali di Kumai Hilir, Kumai Hulu dan Kubu dgn total kasus 138 orang.

Status Gizi

Balita penderita **GIZI BURUK (BGM)** : 1,67%.

BALITA penderita KEP : 14,6%.

BUMIL KEK : 7,5%

Prevalensi GONDOK : 41%. Kecamatan ENDEMIK BERAT : KTW. LAMA dan ARUT UTARA.

Kesehatan Lingkungan

1. Rata-2 Cakupan air bersih : 62,90%.
2. % rumah sehat : 54,38%.
3. % penggunaan jaga sehat : 34,0%.
4. % tempat-2 umum sehat : 73,4%.
5. % tempat pengolahan makanan sehat : 47,5%.

Perilaku Kesehatan

1. Persentase KK Perokok : 71,85%.
2. Peran serta / kepedulian masyarakat thd pemantauan status gizi balita : 39,93%.
3. Kesadaran ibu melahirkan ke Tenaga Kesehatan : 89,30% -
>BAGUS
4. ASI Eksklusif : 67,94%.
5. Garam beryodium : 100%

Peran Serta Masyarakat

1. Posyandu Mandiri : 2,6%
2. TOGA Mandiri : 10%
3. Kemitraan LSM : 2 organisasi
4. Badan Penyantun Pusk : 50%
5. (B P P).

Situasi Program & Pelayanan Kesehatan:

a. Cakupan Program

1. Pemerataan UCI BAYI tingkat desa : 95,90%.
2. Pemberian Vitamin A BALITA : 80,8%.
3. Persalinan BUHIR oleh NAKES : 89,3%.

b. Sarana pelayanan kesehatan dasar

Sarana pelayanan kesehatan dasar dapat dilihat seperti Tabel 2.8. di bawah ini :

Tabel 2.8. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

No	Jenis Sarana Kesehatan Dasar	Jumlah	Ratio Thd. Penduduk
1	Puskesmas		1 : 20.196
2	Pustu	75	1 : 2.845
3	Polindes	56	1 : 3.606

Sumber: Dinas Kesehatan Kobar (2005)

Kondisi Fisik Sarana Kesehatan Dasar

Kondisi Fisik Sarana Kesehatan Dasar Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat seperti **Tabel 2.9.** berikut ini:

Tabel 2.9. Kondisi Fisik Sarana Kesehatan Dasar

No	Jenis Sarana kesehatan dasar	BAIK	Tingkat Kerusakan			
			Total	Berat	Sedang	Ringan
1	Puskesmas	9	-	-	1	-
2	Pustu	44	-	15	10	6
3	Polindes	14	-	26	9	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kobar (2005)

Jenis Tenaga dan Rasio Terhadap Penduduk

Kondisi jenis Tenaga dan Rasio terhadap Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat seperti **Tabel 2.10.** berikut ini:

Tabel 2.10. Jenis Tenaga dan Rasio terhadap Penduduk

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio thd Penduduk
1	Dokter	17	1 : 12.000
2	Dokter gigi	8	1 : 25.530
3	Apoteker	2	
4	Bidan	82	1 : 2.444
5	Perawat	103	1 : 945
6	Asisten apoteker	7	1 : 28.632
7	Sanitasi	20	1 : 10.021
8	Kesehatan Masyarakat	12	1 : 17.080
9	Gizi	8	1 : 25.053
10	Tenaga lainnya	103	
J U M L A H		362	

Sumber: Dinas Kesehatan Kobar (2005)

**Kinerja Sistem Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan
Kotawaringin Barat Tahun 2004**

Gambaran kinerja sistem pelayanan minimum bidang kesehatan dapat dilihat seperti Tabel 2.11. berikut:

Tabel 2.11. Kinerja SPM Bid. Kesehatan KTW. Barat Tahun 2004

No	Urusan Kewenangan Wajib	Jml Indikator Kinerja SPM		%
		Yang Ada	Tercapai Target Th.2005	
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	16	9	56,25
2	Perbaikan Gizi Masyarakat	7	5	71,43
3	Pelayanan Kesehatan Rujukan & Penunjang	4	3	75,00
4	Pemberantasan Penyakit Menular	13	8	61,54
5	Kesehatan Lingkungan & Sanitasi Dasar	3	2	66,67
6	Promosi Kesehatan	4	3	75,00
7	Pencegahan & Penanggulangan NAPZA	1	0	00,00
8	Pelayanan Farmasi & Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	4	3	75,00
9	Penyediaan Pembiayaan & Jaminan Kesht.	2	1	50,00
JUMLAH		54	34	62,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kobar (2005)

d. Pendidikan

Kondisi pendidikan Kabupaten Kotawaringin barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Perkembangan Jumlah Siswa dan Lulusan Tingkat SD/MI* Jumlah penduduk pada kelompok umu 7 – 12 Tahun mengalami kenaikan sebanyak 878 orang. Sedangkan siswa SD mengalami kenaikan 1.731 murid dan siswa MI mengalami penurunan 52 siswa. Sedangkan jumlah siswa pada usia 7-12 Tahun untuk SD mengalami kenaikan 4.689 siswa dan MI mengalami penurunan 172 siswa. Angka Prtisipasi Murni 13,94 % dan angka partisipasi kasar 3,29 %.

2. Perkembangan Jumlah Siswa dan Lulusan Tingkat SMP/MTS Jumlah penduduk pada kelompok umur 13 – 15 Tahun mengalami kenaikan sebanyak 128 orang. Sedangkan siswa SMP mengalami kenaikan 364 siswa dan siswa MTs mengalami penurunan 314 siswa. Sedangkan jumlah siswa pada usia 13-15 Tahun untuk SMP mengalami kenaikan 1.016 siswa dan MTs mengalami kenaikan 17 siswa. Angka Partisipasi Murni 18,70 % dan angka partisipasi kasar 4,44 %.
3. Perkembangan Jumlah Siswa dan Lulusan Tingkat SMA/MA/SMK. Jumlah penduduk pada kelompok umur 16 – 18 Tahun mengalami kenaikan sebanyak 57 orang. Sedangkan siswa SMA mengalami kenaikan 112 siswa, siswa SMK mengalami kenaikan 19 siswa, siswa MA mengalami kenaikan 47 siswa. Sedangkan jumlah siswa pada usia 16-18 Tahun untuk SMA mengalami kenaikan 246 siswa; SMK mengalami kenaikan 327 siswa; MA mengalami kenaikan 85 siswa. Angka Partisipasi Murni dan angka partisipasi kasar masing-masing 1%.
4. Jumlah Guru Kotawaringin Barat Tahun 2005. Jumlah Guru dari TK s/d Tingkat SMK yang PNS 1.725 Orang; Guru Bantu 112 Orang; Gukonda 20 Orang dan yang menjadi honor pada berbagai Yayasan 695 orang, jadi total seluruhnya jumlah guru di Kotawaringin Barat 2.552 orang.
5. Jumlah Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Terdapat 199 buah Sekolah Negeri, 105 buah swasta dan ada beberapa sekolah model masing-masing tingkat: SMP satu atap Sambi dan Tanjung Putri; SMK Kecil Telok Bogam; SMK Filial Kolam.
6. Jumlah Gedung Sekolah SD di Kabupaten Kotawaringin Barat Jumlah gedung SD dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 sebanyak 146 buah dan pada tahun 2003 menunjukkan angka pertambahan sebanyak 30 buah. Sedangkan pada tahun 2004 ada pengurangan 9 buah dan pada tahun 2005 ada penambahan 9 buah.
7. Kondisi Gedung SD Sampai dengan Tahun 2005 terdapat 194 ruang kelas kondisi rusak ringan dan 263 ruang kelas rusak berat.

e. Kesejahteraan sosial

Kondisi permukiman di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau dari pola pembentukannya pada umumnya membentuk pola linier. Bentuk pola linier ini diperlihatkan oleh suatu permukiman yang berkelompok dengan pola perkembangannya membentuk dan memanjang sepanjang tepian jalur-jalur aliran sungai dan jaringan jalan yang ada.

Pembentukan pola pemukiman ini berhubungan dengan kondisi fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat yang banyak dilalui sungai, terlebih keberadaan sungai ini dijadikan urat nadi lalu lintas kegiatan sosial ekonomi penduduknya. Adapun bentuk pola pemukiman seperti ini dapat dilihat memanjang pada setiap kecamatan - kecamatan yang dilaluinya, misalnya sepanjang Sungai Lamandau, Arut, Kumai dan beberapa sungai kecil lainnya. Bagi warga Kotawaringin Barat, kehidupan sehari-hari mereka tidak dapat terlepas dari sungai yang selain menjadi jalur transportasi juga menjadi tempat mandi, cuci, menangkap ikan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya kota dan transportasi darat maka terdapat kecenderungan perkembangan permukiman yang menjauhi sungai dan menuju ke darat.

Disamping itu terdapat suatu bentuk pola permukiman grid yaitu pola pemukiman yang diperlihatkan oleh permukiman-permukiman transmigrasi. Di Kabupaten Kotawaringin Barat permukiman transmigrasi tadi disebut dengan kata Satuan Pemukiman (SP). Pola pemukiman ini biasanya dibuat secara terpadu, dimana masing-masing unit bangunan rumah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan sosial (istirahat, berkumpul dengan keluarga) dikelilingi oleh lahan-lahan yang secara langsung dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi mereka (bertani, berkebun).

4. Agama

Sarana peribadatan penduduk di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat beragam jenisnya. Hal ini berkaitan dengan jenis agama yang dipeluk oleh penduduk wilayah tersebut. Dilihat dari struktur penduduk menurut agamanya maka mayoritas penduduk di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penganut agama Islam sebanyak 138.017 jiwa, kemudian agama Kristen (Protestan dan Katolik) yaitu sebanyak 10.688 jiwa, penganut agama Hindu 5.946 jiwa, dan agama yang dianut paling sedikit oleh masyarakat adalah agama Budha yaitu sebanyak 271 jiwa.

Berdasarkan kondisi pemeluk agama di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, maka jumlah dan distribusi sarana peribadatan yang berupa Mesjid serta gereja cukup merata pada masing-masing wilayah kecamatan, Di Kabupaten Kotawaringin Barat jumlah fasilitas peribadatan terdiri dari masjid sebanyak 162 unit, gereja sebanyak 68 unit. Besarnya tingkat pelayanan dari seluruh jenis fasilitas adalah tinggi. Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Jumlah Fasilitas Peribadatan Kabupaten Kotawaringin Barat dirinci Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Masjid	Gereja	Mushola	Kuil/ Pura	Balai Kaharingan
1	Ktw. Lama	112	2	15	0	1
2	Arut Selatan	66	28	51	3	0
3	Kumai	77	36	143	0	0
4	Pangkalan Banteng	-	-	-	-	-
5	Pangkalan Lada	-	-	-	-	-
6	Arut Utara	7	2	11	0	0
Jumlah		162	68	220	3	2

Sumber : Kab. Kotawaringin Barat Dalam Angka,2004

5. Karakteristik Sarana Prasarana

a. Transportasi dan perhubungan

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi adalah jalan, terminal dermaga yang menjadi alur dan titik simpul transportasi. Sedangkan sarana transportasi meliputi semua jenis kendaraan baik di darat ataupun di air. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi mempengaruhi kelancaran perhubungan didalam suatu wilayah. Selain transportasi darat, transportasi sungai juga merupakan transportasi yang vital di Kabupaten Kotawaringin Barat karena masih terdapat kecamatan yang belum terjangkau oleh prasarana jalan. Bahkan sampai sekarang perhubungan ke kecamatan Kotawaringin Lama harus ditempuh melalui sungai. Perhubungan darat membutuhkan waktu yang jauh lebih lama.

Transportasi Darat

Prasarana transportasi darat di Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi dalam jalan negara, jalan propinsi, jalan kabupaten selebihnya merupakan jalan desa, perkebunan dan jalan HPH. Untuk kondisi jalan ini sangat tergantung dari musim, karena apabila musim hujan ada ruas-ruas jalan yang mengalami banjir sehingga tidak bisa dilalui. Masing - masing panjang, kondisi dan konstruksi jalan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.14. dan Peta Gambar 12 Jaringan Jalan)

Tabel 2.13. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km)

Tahun	Diaspal	Kerikil	Tanah	Tidak dirinci	Jumlah
2003	573,72	247,09	582,71	164,63	1.568,15
2002	529,47	240,60	595,02	154,37	1.519,46
2001	758,31	453,25	1.013,40	23,04	2.248,00
2000	580,02	455,71	924,38	6,90	1.969,01
1999	509,33	432,04	591,66	-	1.533,03

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2003

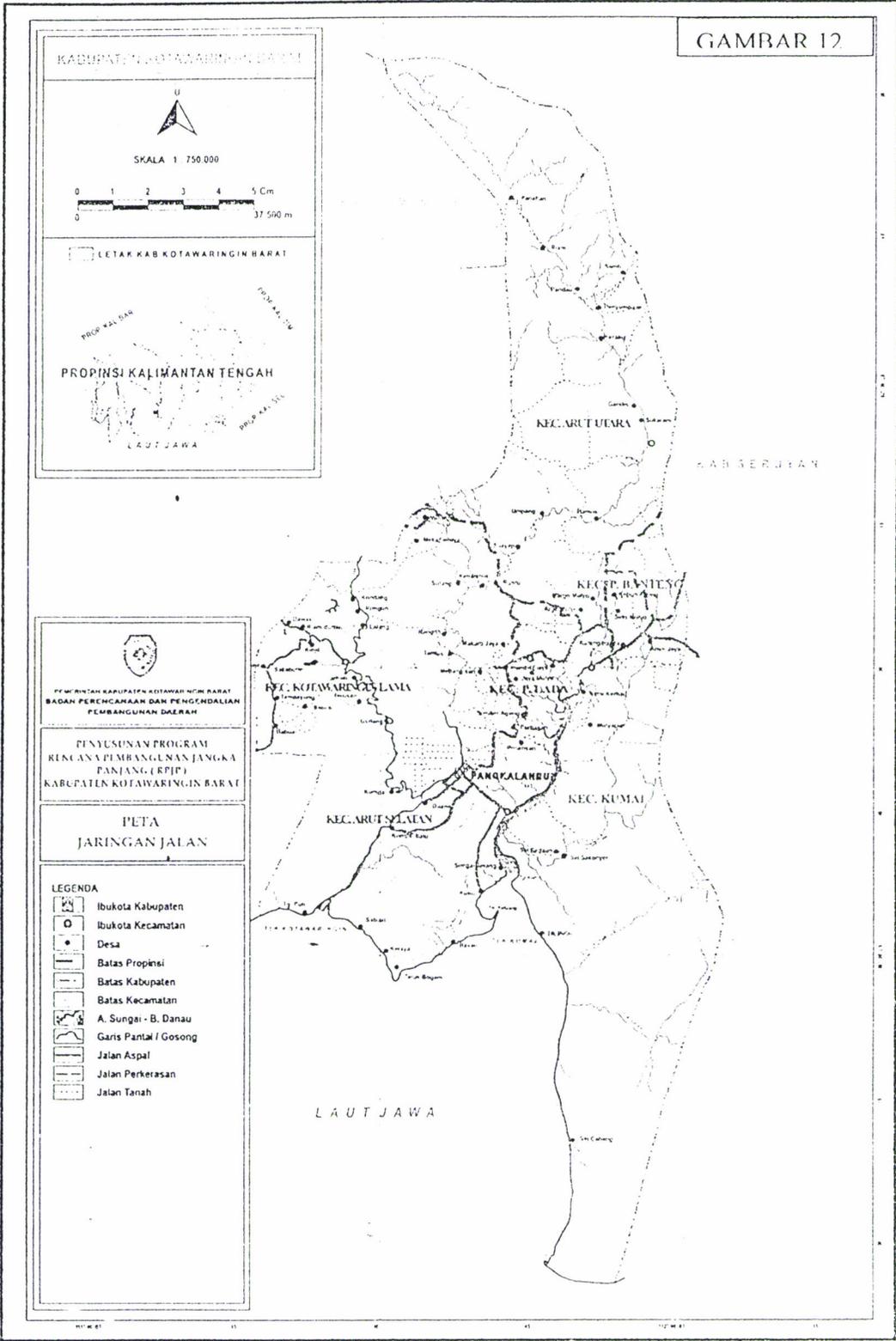
Tabel 2.14. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)

Tahun	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
2003	353,94	674,21	317,74	222,26	1.568,15
2002	302,62	657,06	320,79	238,99	1.519,46
2001	326,34	1.184,65	465,46	271,55	2.248,00
2000	357,81	868,44	539,84	199,89	1.969,01
1999	509,33	432,04	331,46	260,20	1.533,03

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2003

Berikut Gambar 12 Peta Jaringan Jalan.

GAMBAR 12



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Kotawaringin Barat

Permasalahan pada jalan tersebut di atas adalah tingginya biaya pemeliharaan oleh karena kondisi tanah yang labil dan peka terhadap erosi. Demikian juga Banyak sungai yang memotong jalur jalan tersebut sehingga harus membuat banyak jembatan terminal merupakan salah satu fasilitas penting untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang digunakan sebagai tempat naik-turunnya penumpang dan barang antar kota atau di dalam wilayah. Di Kabupaten Kotawaringin Barat terminal yang ada hanya berupa pangkalan-pangkalan angkutan umum saja tanpa didukung oleh bangunannya kecuali di Pangkalan Bun, yang merupakan terminal angkutan luar kota (antar kabupaten dan antar propinsi). Tetapi sejauh ini sedikit bis yang bersedia menaikkan penumpang dari terminal karena belum ada keterkaitan yang jelas antara angkutan luar kota dan angkutan dalam Kota Pangkalan Bun.

Dilihat dari kondisi jalan ternyata hanya 353,94 Km atau 22,57% dari seluruh panjang jalan di kabupaten Kotawaringin Barat yang dinyatakan baik. Sedang 222,26 km atau 14,17% dinyatakan rusak berat. Dari jalan sepanjang 1.568,15 km ternyata baru 573,72 km atau 36,59% yang diaspal. Ini semua menunjukkan bahwa kondisi prasarana jalan di kabupaten ini masih sangat memprihatinkan, terutama pada daerah pedalaman seperti Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan.

Transportasi Air

Paralel dengan kebutuhan transportasi darat yang tidak semuanya dapat dipenuhi oleh prasarana jalan, maka transportasi air yang sudah berabad-abad ada di Kabupaten Kotawaringin barat tetap dilanjutkan. Kondisi sungai dengan kelebaran yang memadai dan juga dapat menjangkau sampai wilayah pedalaman menyebabkan sungai juga berfungsi sebagai prasarana transportasi pergerakan penduduknya. Akan tetapi transportasi sungai ini mempunyai kelemahan baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Pada saat musim kemarau

biasanya terjadi surutnya air sungai yang dapat menghambat kapal-kapal besar masuk ke daerah pedalaman, hal ini dikarenakan :

- Rendahnya debit air
- Turunnya permukaan air
- Munculnya batu - batu di dasar sungai ataupun kayu-kayu yang tadinya tenggelam di dasar sungai sehingga mempertinggi resiko perjalanan kapal.

Sebaliknya pada musim hujan, satu-satunya gangguan yang dihadapi adalah derasnya arus sungai yang akan menghambat laju kapal menuju hulu sungai. Selain itu karena umumnya kota-kota di pedalaman berkembang di pinggir sungai, banyak pula penyebrangan sungai untuk menuju bagian kota lainnya sehingga memerlukan kehati-hatian dari pengemudi kapal dalam menyebrang arus yang deras tersebut

Kabupaten Kotawaringin Barat dialiri oleh sungai sebagai sarana transportasi air adalah Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau dan beberapa sungai kecil lainnya yang bermuara di Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau. Aliran sungai ini sampai sekarang masih digunakan untuk lalu lintas pengangkut kayu/barang/hasil pertanian. Pengangkutan penumpang melalui sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama ke daerah yang belum dilalui oleh jalan darat.

Dermaga sungai dan dermaga penyebrangan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat umumnya berada dalam kondisi baik dengan konstruksi terbuat dari kayu ulin dan besi. Dermaga sungai yang terluas adalah dermaga Pasar Indrasari Pangkalan Bun (700 m²). Keberadaan dermaga-dermaga sungai lebih bertujuan untuk memperlancar lalu lintas aliran penumpang, bukan aliran barang. Dengan demikian untuk pengangkutan barang akan masih tetap mengandalkan pada angkutan sungai-sungai.

b. Telekomunikasi dan informasi.

Kebutuhan akan prasarana telekomunikasi dirasakan sangat penting karena manfaat dari pelayanan jasa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Prasarana telekomunikasi umum yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Kantor Pos, Pos Pembantu dan Wartel. Hingga tahun 2003 jumlah dari prasarana tersebut yaitu untuk Kantor Pos sebanyak 4 unit tersebar di semua kecamatan di kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah dan persebarannya dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Jumlah Prasarana Telekomunikasi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama Kecamatan	Kantor Pos	Pos Pembantu	Kntr Pos Desa	Wartel
1	Kotawaringin Lama	0	1	2	1
2	Arut Selatan	1		1	5
3	Kumai	0	3	11	2
4	Pangkalan Banteng	-	-	-	-
5	Pangkalan Lada	-	-	-	-
6	Arut Utara	0	-	-	-
Total		1	4	14	8

Sumber : Kotawaringin Dalam Angka, 2004

Sambungan telepon di Kotawaringin Barat telah mencapai kepedalaman walaupun di Pangkut dan Kotawaringin Lama masih menggunakan sistem radio. Selain itu juga telah ada telepon seluler baik dari Satelindo ataupun Telkomsel. Tetapi karena sifatnya Prabayar dan merupakan jaringan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan keseluruhan, sulit untuk di data berapa jumlah nomor telepon seluler yang aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat. Yang jelas bahwa sejauh ini telepon seluler ini hanya aktif di Kota Pangkalan Bun dan sekitarnya.

c. Air Bersih

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi penduduk secara rutin guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik buruknya pelayanan air bersih akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku air untuk pengolahan lebih lanjut. Hingga saat ini sumber bahan baku air yang tersedia untuk diolah dan dijadikan air bersih, umumnya diambil dari sumber bahan baku air sungai. Penduduk yang menggunakan sarana air bersih yang disediakan PDAM masih relatif kecil, karena penduduk

terutama yang berada di tepian sungai telah menjadikan air sungai tersebut sebagai sarana keperluan air minum ataupun mandi, cuci dan kakus (MCK) secara langsung yang belum tentu terjamin kesehatannya.

Pelayanan air bersih dari PDAM di Kabupaten Kotawaringin Barat persebarannya belum merata di setiap kecamatan oleh hanya terpusat kepada kota-kota kecamatan dan beberapa desa yang dekat dengan ibukota kecamatan. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat. Unit pelayanan PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Kapasitas Terpasang, Kapasitas Produksi PDAM Kotawaringin Barat

No.	Lokasi	Kapasitas (L/Det)	Sumber Air baku
1.	Pangkalan Bun	80 dan 30	Sungai
2.	Mendawai Seberang	5	Sungai
3.	Kumai	10 dan 2,5	Sungai Dan Mata Air
4.	Kotawaringin lama	2,5	Sungai
5.	Kumpai Batu Atas	5	Mata Air

Sumber : PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2003

Kapasitas belum optimal digunakan karena jumlah pelanggan masih sedikit dan kebocoran air penyebabnya antara lain pada pipa distribusi dan pipa banyak usia tua disamping itu juga banyaknya meter air pelanggan yang rusak sehingga banyak diambil rata-rata pemakaiannya. Sampai saat ini PDAM belum mampu mengganti secara keseluruhan meter air yang rusak pada pelanggan karena masalah dana. Sedang jumlah pelanggan PDAM dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Pelanggan dan banyaknya air yang disalurkan PDAM

Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Volume air yang disalurkan (m ³)
Rumah Tangga	6.463	1.229.828
Niaga Besar	505	173.437
Industri	-	-
Sosial	217	53.608
Instansi Pemerintah	78	18.920
Khusus	1	100.909
Jumlah	7.171	1.576.702.-

Sumber : Kotawaringin Barat dalam Angka 2004

d. Energi (Listrik)

Kebutuhan tenaga listrik untuk kabupaten Kotawaringin Barat dilayani oleh PT. PLN Cabang Kabupaten Kotawaringin Barat. Sumber tenaga pembangkitnya PLTD yang terletak baik di pangkalan Bun ataupun di Kumai. Jumlah rumah tangga yang telah mengkonsumsi aliran listrik PLN di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 26.251 Rumah tangga atau sekitar 54,24 % dari total rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan kata lain terdapat jumlah 22.151 rumah tangga (45,76%) yang belum terpasang fasilitas listrik. Pada masing-masing kecamatan terlihat bahwa kecamatan Arut Selatan yang paling besar prosentasenya pelanggan (69,47 % terhadap jumlah RT kecamatan Arut Selatan), kemudian disusul oleh Kumai, dan kecamatan yang paling sedikit RT memasang listrik adalah kecamatan Arut Utara (11,20 % dari jumlah RT di Arut Utara). Untuk lebih jelasnya lihat Tabel Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Jumlah Pelanggan Listrik Di Kabupaten Kotawaringin Barat Dirinci Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Pelanggan PLN	RT	Rasio Pelanggan terhadap jumlah RT (%)
1	Kotawaringin Lama	1.274	4.255	29,94
2	Arut Selatan	14.693	21.149	69,47
3	Kumai*)	10.078	21.159	47,63
4	Pangkalan Banteng	-	-	-
5	Pangkalan Lada	-	-	-
6	Arut Utara	206	1.839	11,20
Jumlah		26.251	48.402	54,24

*) Data didapat sebelum pemekaran Kecamatan Kumai
Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2003

6. Pemerintahan

Dalam pelayanan pemerintahan umum menyangkut produk hukum pada tahun 2000 (29 PERDA); tahun 2001 (16 PERDA); tahun 2002 (21 PERDA); tahun 2003 (17 PERDA); tahun 2004 (10 PERDA). Selanjutnya keputusan Kepala Daerah 2000 (11 Keputusan); tahun 2001 (7 keputusan); tahun 2002 (21 keputusan); tahun 2003 (12 keputusan); tahun 2004 (13 keputusan). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.19. berikut ini.

Tabel 2.19. Daftar Produk Hukum Daerah Kabupaten Kobar 2000 – 2004

No	JENIS PRODUK HUKUM DERAH	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004	KETERANGAN DIBERLAKUKAN / BELUM DIBERLAKUKAN
A	Peraturan Daerah						
	I. Bidang PAD						
	1. Pajak Daerah	-	-	-	3	1	Diberlakukan
	2. Retribusi Daerah	9	5	10	8	5	-Sda-
	3. Penerimaan lain-lain yang sama	-	1	1	-	3	-Sda-
	6	3	3	3	3	-	-Sda-
	2	6	2	2	1	-	-Sda-
	II. Bidang Anggaran	8	3	2	-	-	-Sda-
	1	1	-	1	-	-	-Sda-
	III. Bidang Kelembagaan	1	-	1	-	-	-Sda-
	1	1	-	-	-	-	-Sda-
	IV. Bidang Pemerintahan	-	1	-	-	-	-Sda-
	V. Bidang Larangan	-	1	-	-	-	-Sda-
	-	-	-	1	-	-	-Sda-
	VI. Bidang Keuangan	-	-	-	1	-	-Sda-
	-	-	-	-	1	1	-Sda-
	VII. Bidang Kewenangan						
	VIII. Bidang Lain-lain						
	1. Poldas						
	2. Properda						
	3. Renstra						
	4. LPJ						
	5. Lingkungan						
	Jumlah Perda	29	16	21	17	10	
B	Keputusan Bupati						Juklak Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (mengatur) diberlakukan
	I. Bidang PAD						
	1. Pajak Daerah	-	-	-	3	1	
	2. Retribusi Daerah	7	1	1	-	-	
	3. Penerimaan Lain-lain yang sama	1	3	3	3	3	-Sda-
	3	3	-	1	-	-	-Sda-
	-	-	1	7	-	-	
	II. Bidang Anggaran	-	-	-	-	1	-Sda-
	III. Bidang Kelembagaan						-Sda-
	IV. Bidang Pemerintahan Desa						-Sda-
	V. Bidang Keuangan						-Sda-
	Jumlah Keputusan	11	7	21	12	13	

Sumber: Bagian Hukum Pemda Kab. Kobar (2005)

2.2 Permasalahan Daerah

Mewujudkan transformasi dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu 20 Tahun yang akan datang, bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa permasalahan yang mendasar dihadapi, diantaranya:

1. Perkembangan pendapatan perkapita yang dicapai Kabupaten Kobar dari tahun 2000 – 2004 masih rendah. Akibat rendahnya pendapatan perkapita yang dicapai selama tahun-tahun yang telah lewat, maka berdampak terhadap tingkat kemiskinan yang masih menjadi beban bagi masyarakat Kota Waringin Barat.
2. Berdasarkan struktur perekonomian daerah kontribusi PDRB masing-masing sektor masih didominasi oleh sektor pertanian. Bahwa tingkat kemajuaan dan kesejahteraan suatu daerah dapat diukur dengan tingkat perkembangan ekonomi. Daerah yang maju pada umumnya daerah yang struktur perekonomiannya memiliki perkembangan relatif seimbang antara sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa.
3. Ketersediaan infra struktur prasarana masih belum memadai dalam mendukung mobilitas ekonomi dan masih terbebani biaya produksi tinggi yang dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat.
4. Dari segi kepadatan penduduk masih dianggap belum padat, sedangkan struktur kelompok usia produktif lebih kecil dibandingkan dengan kelompok usia non produktif. Akibat struktur kelompok usia demikian akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat.
5. Sumber keuangan daerah sangat tergantung kuat dengan Dana Alokasi Umum, karena sumber pendapatan dari PAD masih belum mampu menjadi sumber pendapatan unggulan selama tiga tahun terakhir.
6. Masih terbatasnya lembaga dan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal kualitas pelayanan publik, hal ini disebabkan antara lain belum tersedianya ukuran standard pelayanan prima, perkembangan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dimiliki belum mampu mengimbangi perkembangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
7. Tingkat kerawanan sosial, akibat pengangguran dan paska konflik masih potensi untuk mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

8. Kerusakan lingkungan dapat mengancam lingkungan akan lebih memburuk jika dibiarkan terus.
9. Kebakaran, banjir dan abrasi dapat memperparah kerusakan lingkungan dan akan mengganggu stabilitas kegiatan perekonomian daerah.
10. Lemahnya pengendalian terhadap ekosistem dalam ruang dan tanah yang digunakan dan dimanfaatkan.

Berdasarkan perhitungan Indeks Kemiskinan (Human Poverty Index = HPI) dan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index = HDI) provinsi Kalimantan Tengah (*BPS, BAPPENAS, UNDP tahun 2001 dan 2004*), maka agenda pembangunan yang mendesak harus dilaksanakan untuk percepatan pembangunan manusia adalah:

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan.
2. Peningkatan tingkat harapan hidup.
3. Peningkatan tingkat melek huruf (pemberantasan buta huruf).
4. Peningkatan akses penduduk terhadap air bersih dan sehat.
5. Peningkatan akses penduduk, khususnya penduduk yang sedang sakit, terhadap fasilitas kesehatan.
6. Peningkatan kualitas kesehatan dan kepengasuhan balita.

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2006-2025

Rencana pembangunan harus terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Optimalisasi partisipasi dan peran para pelaku pembangunan harus ditingkatkan secara terkoordinir untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju masyarakat adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan arahan sistem perencanaan nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan mempertimbangkan konteks wilayah, tantangan pembangunan daerah yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, koridor kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dengan mempertimbangkan situasi masa kini dan prediksi umum kondisi Kotawaringin Barat mendatang dan amanat pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka visi dan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka 2006 hingga 2025 adalah seperti yang diuraikan pada bagian berikut ini.

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2006 - 2025

Visi:

Berdasarkan kondisi dan permasalahan umum daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan dengan memperhatikan amanat pembangunan, yaitu cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sejarah pembentukan Kabupaten, nilai-nilai luhur (*universil dan lokal*), serta kesepakatan bersama dalam forum

MUSRENBANG (Selasa, 22 November 2005) maka visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 -2025 adalah:

**KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA,
MANDIRI, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.**

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006–2025 ini adalah landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara hakiki bahwa visi pembangunan dimaksud, harus dapat diukur untuk dapat mengetahui **tingkat keamanan, kemajuan dan kesejahteraan, kemandirian, demokratis dan berkeadilan** yang ingin dicapai.

Indikasi terwujudnya kondisi masa depan tersebut adalah ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

Tingkat keamanan, Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan disegala bidang. Selain kekuatan TNI dan POLRI yang telah dipersiapkan secara nasional, peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dikembangkan melalui mekanisme pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat turut serta bertanggungjawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Tingkat Kemajuan dan Kesejahteraan sebenarnya seiring sejalan dan saling berkaitan bergerak bersama-sama. Kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat ditinjau dengan tingkat perkembangan ekonomi dan tercermin dengan tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh dan merata pembagiannya maka suatu masyarakat di daerah tersebut dapat dikatakan lebih sejahtera dan makmur

dan sekaligus maju pula. Sebagai pendorong atau penggerak agar suatu daerah itu menjadi maju pada umumnya memiliki suatu kekuatan ekonomi utama, yaitu dari sektor industri dengan sumber inputnya dari wilayah itu sendiri dan selanjutnya sektor jasa dan lainnya berkembang mengikuti perkembangan industri. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektorsektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik, sehingga aktivitas perekonomian dapat berlangsung secara efisien dengan produktivitas yang tinggi.

Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya yang terlembaga secara sistemik.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu Daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu Daerah dikatakan makin maju apabila tingkat pendidikan penduduknya semakin tinggi. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang berada di daerah yang bersangkutan.

Kemajuan suatu Daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih

baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, Daerah yang maju juga ditandai dengan Lembaga politik dan kemasyarakatan serta hukum yang fungsional secara mantap. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dan pertahanan.

Kemandirian, masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan eksistensi kehidupannya dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kabupaten Kotawaringin Barat yang ingin diwujudkan bukan hanya Kabupaten Kotawaringin Barat yang adil, maju dan sejahtera saja, tetapi juga mandiri. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian.

Kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Namun kemandirian yang di ingin diwujudkan adalah mengenal adanya kondisi saling membutuhkan dan saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu Daerah dan NKRI maupun masyarakat bangsa-bangsa.

Kemandirian suatu Daerah tercermin pada kemampuan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan sosial dan ekonomi tetapi memiliki daya tahan dan daya suai yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomian. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya.

Dengan demikian, kemajuan dan kemandirian suatu Daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau masyarakat suatu Daerah mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban.

Demokratis, Kotawaringin Barat yang dibangun selain, aman, maju dan sejahtera, mandiri juga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Harus tercermin dalam suasana kekuatan masyarakat sipil dalam perannya dalam segala aspek kehidupan termasuk kemantapan dari kelembagaan demokrasi dan otonomi daerah. Terjaminnya pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

Intensitas berkeadilan harus dapat tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan mendapat lapangan pekerjaan maupun usaha, memperoleh pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, menyampaikan aspirasi dan melaksanakan hak politiknya, serta perlindungan dan kesamaan didepan hukum. Dengan demikian Kabupaten Kotawaringin Barat yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender, dan wilayah.

3.2. Misi Pembangunan Daerah 2006 - 2025

Dalam mewujudkan masyarakat *Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan* dapat ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. ***Mewujudkan masyarakat Kobar yang Aman;*** Misi ini merupakan upaya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjamin masyarakat selalu merasa aman dari berbagai gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan berbagai potensi konflik. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis masyarakat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. ***Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;*** Misi ini merupakan upaya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsesus bersama, adil, efektif dan efisien, akuntabel. Misi ini, merupakan misi yang strategis yang menjiwai implementasi misi-misi lainnya.
3. ***Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis,*** Misi ini merupakan upaya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menegakkan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakkan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat.
4. ***Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.*** Ketersediaan sarana dan prasarana umum adalah komponen yang sangat menentukan daya saing wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ketersediaan sarana dan

prasarana umum akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi sehingga minat berinvestasi dapat ditingkatkan dan direalisasikan secara lebih baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka komponen biaya dari usaha baru maupun usaha yang telah berjalan dapat efisien sehingga daya saing produk / jasa yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Bagi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana umum merupakan faktor vital dalam peningkatan kenyamanan hidup.

5. ***Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.*** Derajat kemajuan dan kesejahteraan serta kemandirian Kabupaten Kotawaringin Barat akan berakar dari potensi dan kekayaan alamnya. Berkembangnya bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan merupakan pondasi bagi transformasi struktur perekonomian dan suatu kemandirian daerah.
6. ***Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan sistem berjejaring antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan.*** Bertambahnya jumlah, jenis dan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) akan berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian perlu dicatat bahwa perkembangan lebih lanjut akan sulit terwujud, jika usaha-usaha tersebut tidak berbasis pada potensi dan keunggulan wilayah serta tidak memiliki jaringan usaha yang kuat, baik antar usaha maupun antar wilayah. Usaha yang tidak berbasis pada potensi dan keunggulan wilayah serta berjejaring akan sulit dalam mencari bahan baku, dan bilapun mampu berkembang, justru akan menyerap daya beli masyarakat ke luar Daerah Kotawaringin Barat. Dengan demikian, maka perkembangan usaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan

daerah serta berjaringan akan mampu menarik daya beli dari luar wilayah melalui ekspor hasil usahanya. Dampak pengganda (*multiplier*) dari sisten kegiatan usaha demikian akan dapat lebih ditingkatkan jika kemitraan antar usaha dan antar daerah dapat dibangun sesuai prinsip-prinsip, nilai-nilai dasar dan sistem ekonomi yang dibangun mengakar berbasis kerakyatan.

7. ***Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.*** Kapasitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh budaya belajarnya. Hal yang sama juga berlaku bagi lembaga; kapasitasnya akan dapat ditingkatkan secara berkesinambungan bila lembaga tersebut mampu menjadi *learning organization*. Berdasarkan kondisi seperti ini, maka pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang harus dapat mewujudkan budaya belajar bagi peserta didiknya. Selain itu, lembaga pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang harus mampu menjadi *learning organization* agar selalu mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi idealnya secara lebih berhasil dan berdaya guna. Dengan cara seperti ini, kecepatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dapat lebih ditingkatkan. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, penuntasan wajib belajar, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta aspek lain dari pendidikan harus diprioritaskan.
8. ***Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan.*** Sehat dan berumur panjang merupakan faktor utama pembentuk kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan semua peluang yang dihadapi untuk peningkatan kesejahteraannya. Dengan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup, maka upaya peningkatan kesehatan akan semakin semakin meningkat karena

masyarakat akan lebih aktif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan ibu hamil, anggota keluarganya, kualitas kesehatan bayi dan balitanya, kesehatan lingkungan, serta pengendalian dan pencegahan penyakit menular.

9. **Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan.** Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan harus dapat direspon secara cepat dan tepat. Oleh karena itu sejak mulai sekarang perlu dibangun suatu kemitraan yang sistematis antar para pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat setempat, serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat agar pencegahan dan kecepatan penanggulangan permasalahan sosial kemasyarakatan dapat ditingkatkan secara signifikan.
10. **Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.** Unit sosial terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Pemampuan keluarga merupakan salah satu pilihan dalam strategi pembangunan manusia. Keluarga yang fungsional, mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi psikologi dan sosial, akan menentukan kapasitas anggota keluarga tersebut. Peningkatan kemampuan belajar, etos kerja dan semangat juang, serta kondisi kesehatannya tetap dimulai dari keluarga. Selain itu, dalam upaya pencegahan (antisipasi) kemiskinan, maka peningkatan kualitas keluarga menjadi sangat vital dan strategis.

Peningkatan kualitas kependudukan akan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Berdasarkan kondisi seperti itu, dalam misi ini juga perlu diupayakan pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas hubungan industrial. Hal ini sedemikian karena sangat terkait

dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi kerentanan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Pengurangan pada pengangguran harus disebut secara eksplisit agar koordinasi kegiatan antar satuan kerja menjadi semakin vital sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

11. **Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.** Alam dan ekosistem tempat manusia hidup memberikan manfaat yang luar biasa bagi peradaban manusia. Alam dan ekosistem tersebut merupakan pinjaman dari anak cucu kita. Sehubungan demikian, bahwa keterkaitan lingkungan hidup dengan keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting di Kotawaringin Barat secara khusus, maka Kobar beserta seluruh elemen masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya memelihara kelestarian dan keamanan TNTP tersebut sebagai asset daerah dan asset nasional bahkan asset internasional secara berkelanjutan. Lingkungan hidup harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa mengganggu kelestariannya sepanjang waktu.
12. **Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.** Ruang dan unit-unit wilayah harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kata produktivitas yang ada dalam misi ini mengisyaratkan bahwa ruang yang belum termanfaatkan dapat ditingkatkan pemanfaatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, keterkaitan antar unit wilayah dikembangkan dan dikendalikan untuk mengurangi biaya-biaya sosial dan ekonomi serta dampak negatif yang mungkin muncul di tahun-tahun yang akan datang.

3.3. Prinsip-Prinsip Dan Nilai-Nilai

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

A. Prinsip-prinsip

Demokrasi; Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat

Partisipasi; Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Transparansi; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Akuntabilitas; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan.

Desentralisasi; Penyerahan sebagian wewenang kepada bawahannya, dalam arti secara hirarki struktural seperti misalnya dari pimpinan kepada staf, dari propinsi kepada kabupaten, dari kabupaten kepada kecamatan, dari kecamatan kepada lurah.

B. Nilai-nilai

Keadilan; Sikap dan tindakan seseorang aparatur yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.

Kebersamaan dalam keragaman; menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama.

Kesetaraan; Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan;

Kerjasama; Komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri;

Disiplin; Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu;

Tanggungjawab; Kesiediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan;

Kemandirian; Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain;

Integritas; Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat;

Profesional; Terampil, handal, dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesi.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006 - 2025

I. Umum

Misi untuk mewujudkan visi Kabupaten Kotawaringin Barat yang **Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan** dijabarkan dalam arah pembangunan daerah. Bab ini akan menguraikan arah pembangunan daerah dari tiap misi.

Arah Pembangunan Daerah untuk Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – Tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Masyarakat Yang Aman**, yang diarahkan melalui:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- b. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.
- c. Meningkatnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan kepada masyarakat.

2. **Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik**, yang diarahkan melalui:

- a. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme serta kesejahteraan aparatur pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, khususnya pelayanan dasar.
- c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
- d. Meningkatnya disiplin aparatur pada kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

- e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja.
 - f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.
3. **Tercukupinya Sarana Dan Prasarana Umum Secara Integratif Dan Komprehensif Dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Terhadap Pembangunan Daerah**, yang diarahkan melalui:
- a. Meningkatnya ketepatan, kualitas prioritas pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dan atau swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - c. Meningkatnya kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum.
4. **Terwujudnya Kotawaringin Barat Yang Demokratis Berlandaskan Hukum**, yang diarahkan melalui:
- a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
 - b. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah.
5. **Terwujudnya Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan Yang Berorientasi Agribisnis Untuk Pengembangan Agroindustri Dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan**, yang diarahkan melalui:
- a. Terwujudnya pemenuhan akan kebutuhan dan ketahanan pangan.

- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional.
 - c. Terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.
 - d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
 - e. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestariannya.
 - f. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.
 - g. Terwujudnya peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- 6. Meningkatnya akselerasi perkembangan koperasi dan ukm serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, yang diarahkan melalui:**
- a. Meningkatnya jumlah pembukaan usaha baru, penyerapan tenaga kerja khususnya UKM dan Koperasi yang berbasis potensi dan Keunggulan Daerah
 - b. Meningkatnya perkembangan dan daya saing usaha-usaha yang telah berdiri
 - c. Berkembangnya usaha sentra, Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Sentra Produksi – Koperasi (KSP/USP-Kop).
 - d. Terwujudnya kinerja pelayanan perizinan dan pengawasan perizinan serta fasilitasi pengembangan UKM
 - e. Terwujudnya stabilitas perekonomian wilayah Kotawaringin Barat.

7. **Terbangun dan berkembangnya budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, terampil, inovatif dan tebal semangat kebangsaan serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, yang diarahkan melalui oleh:**
 - a. Mempercepat peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Menengah dan pendidikan tinggi.
 - b. Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan Non Formal, budaya pembelajaran, Kepustakaan dan kerasipan.
 - c. Terwujudnya kualitas, kuantitas, kesejahteraan, dan penyebaran tenaga pendidik secara adil.
 - d. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan pengembangan teknologi dan informasi pendidikan
 - e. Terlembaganya keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

8. **Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Dan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan, diarahkan melalui:**
 - a. Terwujudnya Kualitas dan Kuantitas derajat kesehatan masyarakat.
 - b. Terwujudnya Sosialisasi Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat
 - c. Terwujudnya kualitas Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat Sejak Usia Dini
 - d. Terwujudnya Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan dan Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Terutama Bagi Penduduk Miskin
 - e. Terkendalinya peredaran Obat dan Makanan serta Ketersediaan Obat

- f. Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Jumlah, Jaringan dan Kualitas Puskesmas hingga Kedaerah Terpencil.
 - g. Terwujudnya Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan
9. **Terwujudnya Kemitraan Yang Sistematis Antara Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Serta Penguatan Partisipasi Kelompok-Kelompok Masyarakat Bagi Pencegahan Dan Peningkatan Kecepatan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan Secara Berkesinambungan**, yang diarahkan melalui:
- a. Terwujudnya efektivitas penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - b. Terwujudnya berbagai bentuk kemitraan dan Aktualisasi Potensi Kapital Sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial
 - c. Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial
 - d. Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
10. **Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kependudukan Dan Ketenagakerjaan, Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda Dan Olah Raga Di Seluruh Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat**, yang diarahkan melalui:
- a. Terwujudnya Kualitas Manajemen Pelayanan Kependudukan, Keluarga Kecil dan Berkualitas.
 - b. Terwujudnya Distribusi Alokasi Penduduk yang Seimbang antar Kecamatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan.

- d. Terwujudnya Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan, Perluasan Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja Produktif, dalam Rangka Mengurangi Penganggur dan Setengah Penganggur, baik di Perdesaan maupun Perkotaan.
- e. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- f. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha serta Perlindungan Tenaga Kerja.

11. Terwujudnya Fungsi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Lestari Dalam Mendukung Fungsi Ekonomi, Sosial Dan Budaya Masyarakat Secara Berkesinambungan, yang diarahkan melalui:

- a. Terwujudnya Kapasitas Sarana, Prasarana Dan Teknologi yang Memadai Dalam Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
- b. Terwujudnya Wadah Koordinasi Pengendalian Lingkungan yang Bersifat Lintas Sektoral dan Lintas Pelaku yang Berkelanjutan.
- c. Terwujudnya Kesadaran dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan Lingkungan Hidup
- d. Terwujudnya Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam kebersinambungan.
- e. Terwujudnya Keberdayaan Perusahaan, Masyarakat Dalam Menyeimbangkan Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam Secara Serráis.
- f. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan disegala bidang.
- g. Terkendalinya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya.

12. Optimalnya Produktivitas Pemanfaatan, Pengendalian Ruang Dan Kawasan Hutan Sesuai Dengan Aturan Hukum Yang Berlaku, yang diarahkan melalui:

- a. Terwujudnya tertib hukum tata ruang, kawasan hutan dan pertanahan
- b. Terwujudnya tertib administrasi tata ruang, kawasan hutan dan pertanahan
- c. Terwujudnya tertib penggunaan tata ruang, kawasan hutan dan pertanahan
- d. Terwujudnya pemeliharaan tata ruang, kawasan hutan dan pertanahan

4.2. Bidang-Bidang

1. Sarana dan Prasarana

A. Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Umum

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum diarahkan untuk

1. Meningkatnya fungsi Pelabuhan Kumai, Bandara Iskandar dalam rangka mobilisasi ekonomi, arus barang, jasa dan orang.
2. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas barang, jasa dan orang pada semua jenis moda.
3. Meningkatnya kelancaran transportasi darat, laut, udara, sungai, danau dan penyeberangan.
4. Meningkatkan pelayanan umum.
5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan, permukiman, lingkungan sehat, dan komunitas perumahan.

6. Meningkatnya kualitas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, dan keterkaitannya antar perkotaan.
7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sehat dan meningkatnya pengelolaan air limbah.
8. Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan.
9. Meningkatkan perlindungan kawasan pantai dan tebing sungai.

B. Peran Serta Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Umum

Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana umum diarahkan untuk:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum lingkungan sekitarnya.
2. Meningkatnya kualitas ketertiban bangunan dalam kawasan keselamatan setiap operasi: pelabuhan, penyeberangan, terminal- terminal, dan penerbangan.
3. Meningkatnya kualitas kemitraan pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan, Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan (ASDP), serta perumahan dan permukiman.

C. Kinerja Pelayanan Bidang Sarana Dan Prasarana Umum.

Peningkatan Kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kemampuan penerapan teknologi konstruksi dan uji mutu konstruksi.
2. Meningkatnya kebijakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum

2. Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

A. Pemenuhan Kebutuhan Dan Ketahanan Pangan

Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan ini diarahkan untuk:

- Meningkatnya ketahanan pangan di tiap Kecamatan.

B. Menghasilkan, Mengolah Dan Memasarkan Berbagai Jenis Produk Yang Mampu Berdaya Saing Nasional Dan Internasional

Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk yang mampu berdaya saing untuk:

- Terwujudnya struktur perekonomian yang dibangun dari sektor agribisnis dan agroindustri yang maju dan kompetitif.

C. Keseimbangan Ekosistem Yang Mampu Menjaga Kelestarian Alam

Peningkatan keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam diarahkan untuk:

- Terjaganya kondisi keseimbangan ekosistem sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan

D. Kesejahteraan Petani Dan Nelayan

Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan diarahkan untuk:

- Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan berbasis pada pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan kompetitif.

E. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Dalam Mendukung Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestariannya

Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan diarahkan untuk:

1. Meningkatnya jumlah produksi, mutu, nilai tambah dan pemasaran produk hasil perikanan.
2. Meningkatnya kekayaan populasi dan stock ikan melalui pengembangan reservasi usaha budidaya serta terpeliharaynya ekosistem sumberdaya hayati.

F. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Secara Efisien, Optimal, Adil Dan Menjaga Keseimbangan Ekosistem

Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan diarahkan untuk:

1. Meningkatnya keteraturan dan ketertiban pemanfaatan dan realisasi potensi sumberdaya hutan.
2. Meningkatnya luas dan kualitas hutan tanaman.
3. Menguatnya peran masyarakat sekitar hutan untuk dapat berperan sebagai pelaku pengelolaan hutan yang sesungguhnya.

G. Peningkatan Kualitas Fasilitas Dan Sarana Fisik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk peningkatan pelayanan ini diarahkan untuk:

- Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

3. Pelayanan Penanaman Modal.

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal.
2. Bertambah dan berkembangnya penanaman modal.

4. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dunia Usaha

A. Peningkatan Jumlah Pembukaan Usaha Baru

Peningkatan jumlah pembukaan usaha baru ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya jumlah pembukaan usaha baru, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah
2. Meningkatnya jumlah pembukaan usaha koperasi pada lapangan usaha yang potensial sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah

B. Peningkatan Daya Saing Usaha-Usaha Yang Telah Berdiri

Peningkatan daya saing usaha ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya daya saing usaha di Kotawaringin Barat.
2. Meningkatnya kinerja koperasi pada semua jenis lapangan usaha sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapinya.
3. Meningkatkan ekspor.

C. Sentra Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Produktif Koperasi

Peningkatan sentra, Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Produktif Koperasi diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kemampuan dunia usaha dalam meningkatkan daya saing Koperasi pada semua sektor.
2. Meningkatnya sentra Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Produktif Koperasi dalam peningkatan aksesibilitas lapangan usaha.
3. Meningkatnya peran lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi profesi dalam pengembangan daya saing usaha

D. Kinerja Pelayanan Perizinan Dan Pengawasan Perizinan Serta Fasilitasi Pengembangan UKM

Peningkatan pelayanan perizinan dan pengawasan serta fasilitasi pengembangan UKM diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan usaha.
2. Terkendalinya aktivitas-aktivitas perusahaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup bagi masyarakat.

E. Stabilitas Perekonomian

Peningkatan stabilitas perekonomian diarahkan untuk:

1. Meningkatnya ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dari sembilan bahan pokok, Bahan Bakar Minyak serta barang-barang strategis lain sesuai dengan kondisi permintaannya
2. Meningkatnya kepastian transaksi perekonomian.
3. Meningkatkan pengawasan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah.

5. Kependudukan, Ketenagakerjaan, Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan olah Raga

A. Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Kependudukan Dan Keluarga Kecil Berkualitas

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kependudukan ini diarahkan untuk:

1. Terkendalinya pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk
2. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan keluarga kecil yang berkualitas sebagai pusat pembelajaran dan pembudayaan nilai-nilai
3. Meningkatnya Penguatan kelembagaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

B. Distribusi Dan Alokasi Penduduk Yang Seimbang Antar Kota Kabupaten Dan Kecamatan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Distribusi dan alokasi penduduk ini diarahkan untuk:

- Meningkatkan peran dan kualitas program transmigrasi sebagai strategi mempercepat pengembangan wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Peningkatan Kualitas Dan Prestasi Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kepramukaan

Peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan ini diarahkan untuk:

1. Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan, olah raga dan pramuka.
2. Meningkatkan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan.
3. Meningkatkan prestasi olah raga mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat nasional.
4. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga.
5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olah raga.

D. Perluasan Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Dan Peningkatan Kesempatan Kerja Produktif, Di Perdesaan Maupun Perkotaan

Perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja produktif ini diarahkan untuk:

- Mengurangi tingkat pengangguran dan setengah penganggur, baik yang bertempat di perdesaan maupun di perkotaan

E. Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Produktif

Peningkatan kualitas dan produktivitas angkatan kerja ini diarahkan untuk:

- Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

F. Pelembagaan Hubungan Industrial Yang Harmonis

Pelembagaan hubungan industrial ini diarahkan untuk:

- Terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi (pemilik maupun pekerja) dengan suasana kekeluargaan dan demokratis.

6. Pendidikan

A. Mempercepat Peningkatan Kualitas PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Pendidikan Dasar Dan Menengah

Percepatan peningkatan kualitas PAUD, pendidikan Dasar dan menengah diarahkan untuk:

- Meningkatnya kualitas lulusan PAUD, pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Mempercepat Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal, Budaya Pembelajaran, Keperpustakaan Dan Kearsipan

Percepatan peningkatan kualitas pendidikan non formal, budaya pembelajaran, perpustakaan dan kearsipan ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya fungsi satuan-satuan pendidikan non formal.
2. Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan non formal.
3. Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan dengan penyediaan sarana dan prasarana

perpustakaan dan kearsipan, pusat-pusat pembelajaran masyarakat untuk menunjang budaya belajar masyarakat.

4. Penguatan sinergi antara perpustakaan dan kearsipan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat.
5. Tersosialisasi budaya pembelajaran dan jam belajar masyarakat kepada orang tua, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

C. Peningkatan Kualitas Pendidik Secara Adil Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Peningkatan kualitas pendidik ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan penyebaran tenaga pendidik baik pada pendidikan formal maupun non formal.
2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik yang didasarkan pada prestasi dan profesi.
3. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik di lokasi terpencil

D. Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan pendidikan dan pengembangan ini diarahkan untuk:

- Meningkatnya kualitas manajemen di satuan-satuan pendidikan dan pusat-pusat pembelajaran.

E. Pengelolaan Keragaman Budaya Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Bangsa Yang Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Pegelolaan keragaman budaya ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya pelebagaan (pembudayaan) nilai-nilai budaya, sejarah peninggalan kerajaan Kobar.
2. Meningkatnya fungsi objek-objek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pusat pelebagaan (pembudayaan) nilai-nilai budaya, sejarah peninggalan kerajaan Kobar.
3. Meningkatnya dialog antar budaya lokal dan nasional untuk memperkuat kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

F. Pengembangan Perguruan Tinggi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Peningkatan pengembangan perguruan tinggi di daerah diarahkan untuk:

1. Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Peningkatan penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat).
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan mutu pendidikan tinggi.

7. Kesehatan Masyarakat

A. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Tenaga Kesehatan

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan ini diarahkan untuk:

Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit.

B. Sosialisasi Kesehatan Lingkungan Dan Pola Hidup Sehat

Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat ini diarahkan untuk:

1. Membudayanya pola hidup sehat dan bersih
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan

C. Peningkatan Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat Sejak Usia Dini

Peningkatan pendidikan kesehatan ini diarahkan untuk:

Terwujudnya upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda

D. Penataan Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Dan Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Terutama Bagi Penduduk Miskin

Penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan ini diarahkan untuk:

1. Terlaksananya jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan

2. Meningkatnya kualitas pelayanan pusat-pusat kesehatan masyarakat, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat.

E. Peningkatan Pengawasan Obat Dan Makanan Serta Ketersediaan Obat

Peningkatan pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan obat ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya jaminan keamanan pangan dan pengendalian bahan berbahaya
2. Terkendalinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA)
3. Meningkatnya mutu, khasiat dan keamanan produk terapeutik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika
4. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan baku mutu
5. Meningkatnya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
6. Meningkatnya keterjangkauan penduduk miskin terhadap obat dan perbekalan kesehatan
7. Meningkatnya pemanfaatan obat bahan alam Indonesia
8. Terwujudnya standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

F. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Peningkatan Jumlah, Jaringan Dan Kualitas Puskesmas Hingga Ke Daerah Terpencil

Peningkatan upaya kesehatan masyarakat ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak,

- keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar
3. Terwujudnya Peningkatan imunisasi
 4. Terlaksananya Peningkatan pendidikan gizi
 5. Tertanggulangnya kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
 6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

G. Peningkatan Usaha Kesehatan Perorangan

Peningkatan upaya kesehatan masyarakat ini diarahkan untuk:

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit Kelas III.
2. Tersedianya sarana dan prasarana serta peralatan dan perbekalan rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan prioritas pada kabupaten hasil pemekaran.
3. Termanfaatkannya sarana rumah sakit / Puskesmas serta jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Polindes) dengan memberikan pelayanan kesehatan prima.

8. Kesejahteraan Sosial

A. Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas hasil Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
2. Meningkatnya kualitas hasil Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

3. Meningkatnya kualitas hasil Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
5. Meningkatnya kualitas pembinaan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
6. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat
7. Meningkatnya cakupan dan kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi anak Nakal

B. Pengembangan Kemitraan Dan Aktualisasi Potensi Kapital Sosial Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial

Pengembangan kemitraan dan aktualisasi potensi sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya keberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya keberdayaan Karang Taruna dalam kerangka berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya keberdayaan LSM, Organisasi Sosial dan PMI dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial
4. Meningkatnya kualitas hasil Kerjasama Lintas Sektor Dunia Usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
5. Meningkatnya Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
6. Meningkatnya Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
7. Meningkatnya peran serta PKK dalam pembangunan dengan mengembangkan secara nyata 10 (sepuluh) programnya untuk kesejahteraan keluarga.

8. Meningkatnya keberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
9. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan desa dan Masyarakat.
10. Meningkatnya kualitas dan kapasitas modal sosial yang ada dalam mendukung pembangunan.

C. Pengembangan Inisiatif, Prakarsa Dan Kebijakan Antisipatif Terhadap Bencana Alam Dan Sosial

Pengembangan inisiatif dan prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Lainnya (SAR)
2. Meningkatnya keberdayaan Sosial Korban Bencana
3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan

D. Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak

Kesetaraan dan keadilan gender ini diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi (keberpihakan), terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial, politik dan hukum
2. Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya
3. Terwujudnya ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan diberbagai bidang pembangunan
4. Meningkatnya hasil komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

5. Terwujudnya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum dan ketenagakerjaan
6. Meningkatnya hasil komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
7. Mewujudkan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk pusat studi wanita/gender

9. Pariwisata dan Seni Budaya

A. Peningkatan Daya Saing Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Wisata Secara Optimal

Peningkatan daya saing pariwisata ini diarahkan untuk:

1. Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan Kotawaringin Barat (TNP, Kawasan Peninggalan Kerajaan Kobar, Margasatwa di Sei Siram dan Wisata Alam Lainnya).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan nilai-nilai budaya asal kerajaan kobar, nilai-nilai budaya Dayak, dan daerah wisata alam sebagai objek daya tarik wisata yang kompetitif.
3. Meningkatnya sadar wisata masyarakat Kotawaringin Barat.
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Mengembangkan Kebudayaan Daerah Dan Nilai-Nilai Budaya Daerah

Pengembangan kebudayaan daerah dan nilai-nilai budaya daerah diarahkan untuk:

1. Pelestarian dan perlindungan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk memperkuat jati diri, meningkatkan harkat dan martabat serta kepribadian bangsa.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat Kotawaringin Barat menggali nilai-nilai budaya luhur daerah dan menerima nilai-nilai positif yang berasal dari luar melalui pengembangan karya, cipta, rasa, dan karsa untuk memperkaya khasanah keanekaragaman budaya di daerah.

10. Agama

Berkembangnya kehidupan beragama yang semakin harmonis dan mendalam yang diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta berkembangnya ahlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan dan pendidikan agama. -
3. Meningkatnya koalitas kerukunan hidup Amat beragama dan masyarakat.
4. Meningkatnya kalitas pelayanan dan pemenuhan sarana dan prasarana kehidupan beragama.

11. Pemerintahan

A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masing-masing SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatnya profesionalisme aparat.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilayani oleh masing-masing oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatnya fungsi hasil Pengaduan Masyarakat untuk perbaikan kinerja masing-masing SKPD secara berkelanjutan

C. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas ini diarahkan untuk:

Meningkatnya kelembagaan (pembudayaan) akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

D. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya fungsi DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk percepatan perwujudan kewajiban daerah otonom.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPRD pada konstituennya dalam bidang politik
3. Meningkatnya kualitas komunikasi politik

4. Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan produk hukum Kabupaten Kotawaringin Barat.

E. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara

Pengelolaan sumberdaya manusia aparatur ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia untuk mendukung peningkatan kinerja masing-masing SKPD.
2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan aparatur pemerintah.

F. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya hasil dan kinerja pengelolaan dan manajemen keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

12. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

A. Peningkatan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Taman Nasional Tanjung Puting, Marga Satwa Di Sei Siram Yang Lestari

Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan TNTP, Marga Satwa di Sei Siram diarahkan:

1. Tersedianya sarana, prasarana pengelolaan dan pemanfaatannya sehingga mendukung eksistensi dan kesinambungan dari TNTP sebagai asset nasional dan daerah serta perhatian dunia.
2. Tersedia sarana, prasarana pengelolaan dan pemanfaatan Marga Satwa di sei Siram sehingga mendukung eksistensi dan kesinambungannya sebagai obyek wisata alam.

B. Peningkatan Kualitas Fungsi Kawasan Lingkungan Hidup Dalam Suatu Sistem Sebagai Penyangga Ekosistem Kehidupan Agar Terwujud Keseimbangan, Keselarasan Dan Keserasian.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu kawasan lingkungan hidup dalam suatu sistem meliputi fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang secara otomatis dan alami merupakan subsistem lingkungan regional, nasional dan dunia. Peningkatan kualitas fungsi kawasan lingkungan hidup diarahkan:

1. Peningkatan kualitas fungsi kawasan lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata dan Suaka Margasatwa).
2. Peningkatan kualitas fungsi dan pemanfaatan konservasi kawasan budidaya dengan tetap menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian lingkungan.
3. Peningkatan pengendalian lingkungan dengan mewajibkan melaksanakan kegiatan AMDAL untuk setiap pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan budidaya (Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan pengembangan produksi, pemukiman dan penggunaan lainnya, areal transmigrasi, rencana areal transmigrasi, kawasan khusus, danau dan sungai).

C. Peningkatan Kapasitas Sarana, Prasarana, Teknologi Dan Sdm

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi dan SDM ini diarahkan untuk:

1. Tersedianya sarana, prasarana pengelolaan laboratorium SDA yang mampu mendukung berbagai kebijakan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup.
2. Terwujudnya penemuan serta pemanfaatan teknologi tepat guna yang mampu mengefisienkan serta mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam

3. Terwujudnya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
4. Terwujudnya Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5. Pembangunan Pengembangan Jaringan Listrik Tegangan Menengah SUTM dan SUTR
6. Terwujudnya Pembangunan Genset di instalasi vital milik pemerintah daerah.
7. Terwujudnya Pemanfaatan Air Bersih Sungai, Air Sumur Masyarakat, Air Bawah Tanah, Mata Air pada semua desa
8. Meningkatnya ketertiban penggunaan sumber energi listrik
9. Terwujudnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kalori rendah.

D. Peningkatan Kesadaran Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup

Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup ini diarahkan untuk:

1. Mewujudkan kesadaran hukum pada berbagai stakeholder daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup,
2. Mewujudkan fasilitas yang terstruktur terhadap penegakan hukum lingkungan di daerah

E. Peningkatan Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Aman Dan Ramah Lingkungan

Peningkatan pola pemanfaatan sumberdaya alam ini diarahkan untuk:

1. Terwujudnya kapasitas SDM yang handal dalam mengembangkan serta mengimplementasi pola pemanfaatan sumber daya yang aman serta ramah lingkungan

2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup
3. Terwujudnya ketertiban pemanfaatan sumber daya pertambangan yang aman dan ramah lingkungan
4. Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan sumber daya air bawah tanah
5. Terwujudnya pelayanan perijinan pertambangan yang responsif dan mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Terwujudnya koordinasi lintas sektoral dan multi stakeholder dalam eksplorasi sumber daya pertambangan
7. Terwujudnya pengembangan hutan kemasyarakatan (*social forestry*)
8. Terwujudnya UKM kehutanan yang maju serta berdaya saing tinggi

F. Peningkatan Peran Perusahaan Dan Masyarakat Dalam Menyeimbangkan Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Yang Serasi

Peningkatan peran serta perusahaan dan masyarakat ini diarahkan untuk:

1. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan dan Wilayah Pertambangan
2. Melembaganya (terbudayakannya) kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam
3. Terwujudnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah hutan dalam menjaga keserasian pengelolaan dan pelestarian sumber daya kehutanan
4. Terwujudnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dalam menjaga keserasian pengelolaan dan pelestarian sumber daya pertambangan

5. Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan sumber daya alam
6. Terwujudnya pengembangan hutan masyarakat
7. Terwujudnya Penghijauan/Hutan Rakyat/ Kebun Rakyat
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya perikanan dan pertambangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)
9. Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengendalian dan pengembangan keanekaragaman hayati
10. Meningkatnya pengawasan dan pengamanan areal eks HPH
11. Meningkatnya pengendalian Limbah B3

13. Tata Ruang dan Pertanahan

A. Peningkatan Tertib Hukum Tata Ruang Dan Pertanahan

Peningkatan tertib hukum tata ruang dan pertanahan ini diarahkan untuk:

Meningkatnya tertib hukum dan kepastian hukum pemanfaatan dan penggunaan ruang dan pertanahan

B. Peningkatan Tertib Administrasi Tata Ruang Dan Pertanahan

Peningkatan tertib administrasi tata ruang dan pertanahan ini diarahkan untuk:

Meningkatnya kualitas output database penatagunaan tanah, yang meliputi data pemilikan dan penggunaan hak atas tanah serta tanah terlantar

C. Peningkatan Tertib Penggunaan Tata Ruang Dan Pertanahan

Peningkatan tertib penggunaan tata ruang dan pertanahan ini diarahkan untuk:

1. Meningkatnya ketertiban pemilikan dan penguasaan hak atas tanah (P3HT)
2. Redistribusi tanah sesuai dengan potensi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

D. Peningkatan Pemeliharaan Tata Ruang Dan Pertanahan

Peningkatan Tertib Pemeliharaan Tata Ruang Dan Pertanahan Ini Diarahkan Untuk:

1. Meningkatnya Kemampuan Para Pihak Pengguna Dan Pemanfaat Tanah Dalam Pemeliharaan Tanah.
2. Terkendalinya Ekosistem Dalam Ruang Dan Tanah Yang Digunakan Dan Dimanfaatkan.

E. Penyelesaian Tapal Batas Wilayah

Peningkatan tertib pemeliharaan tata batas wilayah dan pertanahan diarahkan untuk terwujudnya penyelesaian tapal batas wilayah dengan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan sebagai landasan hukum dan kewenangan pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten.

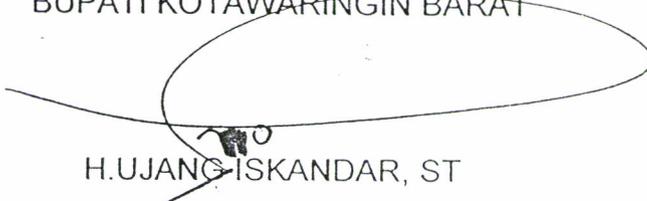
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah serta masyarakat didalam penyelenggaraan pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan.

Arah Pembangunan Daerah yang dimuat dalam dokumen ini merupakan jabaran rinci dari Visi dan Misi yang menjadi prasyarat yang harus benar-benar dapat mewujudkan visi Kotawaringin Barat.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi **KOTAWARINGIN BARAT YANG ADIL, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA MANDIRI**, hendaknya mendapat dukungan dari: 1) Komitmen dari kepemimpinan eksekutif yang kokoh dan demokratis; 2) Keselarasan dan kesamaan persepsi serta pemahaman terhadap visi dari seluruh unsur MUSPIDA; 3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; 4) Keberpihakan kepada rakyat; dan 5) Peran serta seluruh elemen masyarakat.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



H.UJANG ISKANDAR, ST